



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

STUDI ATAS KOMITE DEWAN KOMISARIS PADA INDUSTRI PERBANKAN YANG TELAH GO PUBLIK DI INDONESIA

SKRIPSI



CHYNTYA DWI KARINA
06153131

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2011

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

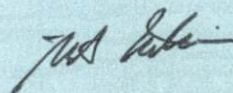
Dengan ini dinyatakan bahwa :

Nama : ChintyaDwi Karina
No. BP : 06 153 131
Program Studi : Strata 1
Jurusan : Akuntansi
Judul Skripsi : "Studi Atas Komite Dewan Komisaris Pada Industri
Perbankan Yang Telah *Go Public* di Indonesia"

Telah disajikan dalam seminar Jurusan Akuntansi dan disetujui oleh Pembimbing Skripsi.

Padang, Mei 2011

Pembimbing



Prof. Dr. Niki Lukviarman, SE, MBA, Akt
NIP.131 873 969

Mengetahui :

Dekan

Ketua Jurusan

Dr.H. Syafruddin Karimi, SE, MA
NIP.195410091980121001

Dr Yuskar, SE,MA,Akt
NIP. 196009111986031001

No Alumni Universitas	Chintya Dwi Karina	No. Alumni Fakultas
BIODATA a). Tempat/Tgl.Lahir: Padang 9/8/1987 b). Nama Orang Tua : Muhammad Jimmy dan Susi Haslinda c). Fakultas: Ekonomi d). Jurusan: Akuntansi e). No. BP: 06153131 f). Tgl Lulus: g). Predikat Lulus: h). IPK : i). Lama Studi: j). Alamat Orang Tua: Jl. Parak Gadang II no.26		

Studi Atas Komite Dewan Komisaris Pada Industri Perbankan Yang Telah Go Public di Indonesia

Skripsi S1 Oleh : Chintya Dwi Karina

Pembimbing : Prof. Dr. Niki Lukviarman, SE, MBA, Akt

ABSTRACT

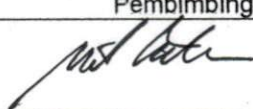
Penelitian ini menggambarkan penerapan corporate governance pada industri perbankan di Indonesia, khususnya terhadap komite-komite Dewan Komisaris dalam hal persebaran anggota komite Dewan Komisaris serta keberadaan komite-komite Dewan Komisaris pada Industri Perbankan dibandingkan dengan aturan yang ada yaitu Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 tentang penerapan corporate governance di Bank Komersial.

Sampel penelitian ini adalah komite-komite Dewan Komisaris pada Industri Perbankan selama tahun 2007 sampai 2009. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari annual report.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komite-komite Dewan Komisaris pada Industri Perbankan terhadap penerapan peraturan di Indonesia, telah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan, namun masih ada beberapa perusahaan yang belum melaksanakannya, terutama dalam pembentukan komite pemantau risiko.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 Januari 2011.

Abstrak ini telah disetujui oleh:

	Penelaah 1	Penelaah 2	Pembimbing
Tanda Tangan			
Nama Terang	Rayna Kartika, SE, M.Com, Ak	Yessi Oktavia Sari, SE, M. Bus, Ak	Prof. Dr. Niki Lukviarman, SE, MBA, Akt

Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi:

Dr. H. Yuskar, MA, Ak
NIP. 19600911.198603.1001

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor alumni Fakultas:	Nama	Tanda Tangan
Nomor alumni Universitas:	Nama	Tanda Tangan

KATA PENGANTAR

*Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul **STUDI ATAS KOMITE DEWAN KOMISARIS PADA INDUSTRI PERBANKAN YANG TELAH GO PUBLIK DI INDONESIA** dapat terselesaikan dengan baik. Semoga kesejahteraan tercurah bagi Rasul-Nya, Muhammad SAW, sang pemimpin umat manusia. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.*

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. *Mama, Papa dan abang Ivan yang selalu memberikan doa restu kasih sayang yang tulus dan juga semangat sehingga penulis bisa meraih gelar sarjana.*
2. *Dr. H. Syafruddin Karimi, SE., MA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.*
3. *Dr. Yuskar, SE., MA., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.*
4. *Prof. Dr. Niki Lukviarman, SE, MBA, Akt selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing, memberikan motivasi semangat, dan pengarahan dalam menyelesaikan skripsi ini.*
5. *Drs. Syahril Ali, Msi., Ak., selaku Pembimbing Akademik, yang selama kuliah telah memberikan nasihat kepada penulis.*
6. *Seluruh dosen & staff pengajar Jurusan Akuntansi. Terima kasih atas berbagai ilmu yang sangat berharga.*
7. *Seluruh karyawan biro Akuntansi (da Ari, Ibu Loli, Uni Pit, Uni Eva) yang telah memberikan bantuan dan kemudahan selama penulis kuliah.*
8. *Teman-teman akuntansi baik ganjil dan genap, terima kasih atas semua persahabatan yang manis selama kuliah.*
9. *Uni-uni, uda-uda serta adik-adik atas suka duka dengan penulis selama kuliah.*

10. Seluruh pihak yang telah membantu penulis selama ini terutama dalam menyelesaikan skripsi, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Demikianlah skripsi ini penulis selesaikan, penulis menerima saran dan kritik yang bermanfaat untuk penelitian yang lebih baik di masa yang akan datang.

Padang, Juni 20011

(Penulis)

ABSTRACT

Penelitian ini menggambarkan penerapan corporate governance pada industri perbankan di Indonesia, khususnya terhadap komite-komite Dewan Komisaris dalam hal persebaran anggota komite Dewan Komisaris serta keberadaan komite-komite Dewan Komisaris pada Industri Perbankan dibandingkan dengan aturan yang ada yaitu Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 tentang penerapan corporate governance di Bank Komersial. Sampel penelitian ini adalah komite-komite Dewan Komisaris pada Industri Perbankan selama tahun 2007 sampai 2009. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari annual report. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan komite-komite Dewan Komisaris pada Industri Perbankan terhadap penerapan peraturan di Indonesia, telah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan, namun masih ada beberapa perusahaan yang belum melaksanakannya, terutama dalam pembentukan komite pemantau risiko.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Definisi <i>Corporate Governance</i>	12
2.2 <i>Corporate Governance</i> pada Perbankan	17
2.3 Dewan Komisaris	20
2.3.1 Komite Audit	22
2.3.2 Komite Pemantau Risiko	26
2.3.3 Komite Nominasi dan Remunerasi	28
2.2.2 Hubungan Fungsi Komite dan Dewan Komisaris dengan <i>Corporate Governance</i>	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Jenis dan Sumber Data	34
3.2 Populasi dan Sampel	34
3.3 Jenis Penelitian	35

3.4 Defenisi Variabel dan Pengukuran	35
--	----

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data dan Pembahasan Komite Audit	42
4.1.1 Persebaran Komite Audit	42
4.1.2 Penerapan <i>Corporate Governance</i>	46
4.2 Analisis Data dan Pembahasan Komite Pemantau Risiko .	49
4.2.1 Persebaran Komite Pemantau Risiko	49
4.2.2 Penerapan <i>Corporate Governance</i>	53
4.3 Analisis Data & Pembahasan K. Nominasi & Remunerasi	55
4.3.1 Persebaran K. Nominasi & Remunerasi	55
4.3.2 Penerapan <i>Corporate Governance</i>	60

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	62
5.2 Keterbatasan Penelitian.....	62
5.3 Implikasi Penelitian di Masa yang Akan Datang	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 4.1	Jumlah Pembentukan Komite Audit.....	42
Tabel 4.2	Gender dalam Komite Audit.....	42
Tabel 4.3	Trend Gender dalam Komite Audit.....	43
Tabel 4.4	Tingkat Edukasi dalam Komite Audit.....	44
Tabel 4.5	Trend Tingkat Edukasi dalam Komite Audit.....	45
Tabel 4.6	Tingkat Usia dalam Komite Audit.....	45
Tabel 4.7	Latar Belakang Pendidikan dalam Komite Audit.....	46
Tabel 4.8	Ketaatan Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5.....	47
Tabel 4.9	Trend Ketaatan Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5.....	47
Tabel 4.10	Persentase Ketaatan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006.....	48
Tabel 4.11	Trend Persentase Ketaatan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006	48
Tabel 4.12	Jumlah Pembentukan Komite Pemantau Risiko.....	49
Tabel 4.13	Gender dalam Komite Pemantau Risiko.....	50
Tabel 4.14	Trend Gender dalam Komite Pemantau Risiko.....	50
Tabel 4.15	Tingkat Edukasi dalam Komite Pemantau Risiko.....	51
Tabel 4.16	Trend Tingkat Edukasi dalam Komite Pemantau Risiko.....	52
Tabel 4.17	Tingkat Usia dalam Komite Pemantau Risiko.....	52
Tabel 4.18	Latar Belakang Pendidikan dalam Komite Pemantau Risiko.....	53
Tabel 4.19	Penerapan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006.....	54
Tabel 4.20	Trend Penerapan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006.....	54
Tabel 4.21	Jumlah Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi.....	55
Tabel 4.22	Gender dalam Komite Nominasi dan Remunerasi.....	56
Tabel 4.23	Trend Gender dalam Komite Nominasi dan Remunerasi.....	56

Tabel 4.24	Tingkat Edukasi dalam Komite Nominasi dan Remunerasi.....	57
Tabel 4.25	Trend Tingkat Edukasi dalam Komite Nominasi dan Remunerasi.....	58
Tabel 4.26	Tingkat Usia dalam Komite Nominasi dan Remunerasi.....	59
Tabel 4.27	Latar Belakang Pendidikan dalam Komite Nominasi dan Remunerasi	59
Tabel 4.28	Penerapan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006.....	60
Tabel 4.29	Trend Penerapan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbagai peristiwa yang terjadi telah menjadikan *corporate governance* sebagai sebuah isu yang penting dikalangan eksekutif, organisasi – organisasi, konsultan korporasi, akademisi, dan regulator (pemerintah) di berbagai belahan dunia. Kajian mengenai *corporate governance* meningkat dengan pesat seiring dengan terbukanya skandal keuangan berskala besar seperti skandal Enron, Tyco, Worldcom, Merck, Global Crossing mayoritas perusahaan lain di Amerika Serikat (Cornett, Marcuss, Saunders dan Tehranian, 2006) yang melibatkan akuntan, salah satu elemen penting dari *corporate governance* (Sam'ani, 2008). Sementara di Indonesia, isu *corporate governance* mulai mengemuka setelah terjadinya krisis ekonomi berkepanjangan pada pertengahan tahun 1997 yang mengakibatkan operasi perusahaan yang tersendat, nilai hutang swasta dan pemerintah membengkak, dan investor asing enggan masuk/kembali ke Indonesia, dan banyaknya perusahaan yang mengalami kebangkrutan (Rustiana, 2004). Sebagaimana dikemukakan oleh Baird 2000 (dalam Maksim, 2005) bahwa salah satu penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara Asia lainnya adalah karena buruknya pelaksanaan *corporate governance* di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki pemerintah (BUMN) maupun yang dimiliki pihak swasta.

Survei yang dilakukan oleh Mc Kinsey and Co (2002) dalam Kusumastuti (2006) menunjukkan bahwa *corporate governance* telah menjadi perhatian utama investor, khususnya pada pasar-pasar yang sedang berkembang. Perusahaan yang menerapkan

corporate governance secara utuh dan berkelanjutan diyakini akan memiliki nilai lebih dibandingkan dengan perusahaan yang tidak atau belum menerapkan *corporate governance*, karena akan membantu perusahaan tersebut untuk menjadi lebih kompetitif secara global. Secara teoritis, praktik *corporate governance* yang baik akan membuat entitas bisnis menjadi efisien, meningkatkan kepercayaan publik, menjaga going concern perusahaan, dapat mengukur target kinerja manajemen perusahaan, meningkatkan produktifitas, dan mengurangi distorsi (Sunarto, 2003).

Menurut Tristiani (2005) *corporate governance* yang baik merupakan awal yang penting untuk membangun keyakinan pasar dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil dan jangka panjang. Hal ini didukung dengan hasil survey bersama *Pricewaterhouse Coopers, Investment Management association of Singapore* dan *Corporate Governance & Financial Reporting Center* bulan Mei tahun 2005 yang menunjukkan bahwa 81% *institutional investors* yang disurvei tertarik berinvestasi di Singapura dikarenakan baiknya aplikasi *corporate governance*-nya (Maksum, 2005). Survey yang dilakukan oleh McKinsey dan Co (dalam Isgiyarta dan Tristiarini, 2005) menjelaskan bahwa pada 189 perusahaan publik di enam emerging market, yaitu: India, Malaysia, Meksiko, Korea Selatan, Taiwan, dan Turki menunjukkan eratnya kaitan antara penerapan *corporate governance* dengan harga saham perusahaan perusahaan tersebut. Hal tersebut disebabkan hampir 75% investor menganggap keterbukaan dan informasi mengenai penerapan *corporate governance* sama pentingnya dengan informasi keuangan yang dipublikasikan oleh suatu perusahaan. Investor bersedia memberikan insentif yang cukup tinggi kepada perusahaan yang menerapkan prinsip *corporate governance*. Bahkan beberapa pihak menganggap informasi mengenai penerapan *corporate governance* lebih penting daripada laporan keuangan perusahaan.

Istilah *corporate governance* itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report* (Tjager et al., 2003 dalam Kesuma, 2005). Laporan ini dianggap sebagai titik balik yang sangat menentukan bagi praktek *corporate governance* di seluruh dunia. *Cadbury Report* mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Defenisi lain memandang *corporate governance* sebagai seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan pihak – pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggung jawab mereka (tjager et al., 2003 dalam Kesuma, 2005).

Struktur *corporate governance* di Indonesia telah diatur dalam hukum dan peraturan yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang RI no.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), yang merupakan kerangka penting bagi perundang-undangan yang ada mengenai *corporate governance* di Indonesia. Berdasarkan UUPT, suatu perusahaan adalah suatu badan hukum tersendiri dengan direksi dan dewan komisaris yang mewakili perusahaan. Struktur organisasi PT di indonesia terdiri dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Komisaris, dan Direksi.

Penelitian mengenai *corporate governance* menghasilkan berbagai mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras dengan kepentingan shareholders (terutama *minority interest*). Mekanisme *corporate governance* dibagi menjadi dua kelompok: (1) berupa *internal mechanism* (mekanisme internal) seperti komposisi dewan direksi/ komisaris, kepemilikan manajerial dan kompensasi eksekutif. (2) *external*

mechanisms seperti pengendalian oleh pasar dan level *debt financing* (Barnhart & Rosentein, 1998 dalam Herawati, 2007).

Dewan komisaris merupakan salah satu organ perusahaan yang turut berperan dan bertanggung-jawab dalam menjamin terwujudnya implementasi sistem *corporate governance* yang baik dan efektif pada suatu perusahaan. Anggapan ini sesungguhnya dikaitkan dengan fungsi utama dari dewan komisaris itu sendiri, yaitu sebagai pengawas dari segala tindakan dan keputusan yang dibuat oleh direksi (Andayani, 2001). Berbagai regulasi telah dikeluarkan untuk ketentuan dewan komisaris. Diantaranya yaitu Undang-undang (UU) No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) mensyaratkan adanya komisaris untuk suatu perseroan terbatas. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan yang : (a) mengerahkan dana masyarakat, (b) menerbitkan surat pengakuan utang, (c) sudah terbuka (*go public*), harus memiliki minimal dua orang komisaris. Selanjutnya Surat Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta BEJ Nomor: Kep-315/BEJ/06-2000 mengharuskan perusahaan yang terdaftar di bursa efek untuk memiliki dewan komisaris yang memonitor perusahaan agar tercipta *Good Corporate Governance* di Indonesia. Khusus untuk perusahaan-perusahaan terbuka, BAPEPAM mensyaratkan adanya komisaris independen dengan komposisi minimal sepertiga dari seluruh jumlah komisaris. Berdasarkan UU ini, Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberi nasehat kepada Direksi (pasal 97).

Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling tidak 3 (tiga) komite yang memiliki peran penting dalam kerangka kerja *corporate governance* yaitu Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko, Komite Remunerasi dan Nominasi. Adanya komite-komite ini merupakan suatu sistem yang

bermanfaat untuk dapat melaksanakan pekerjaan dewan komisaris secara lebih rinci dengan memusatkan perhatian dewan komisaris kepada bidang khusus perusahaan atau cara pengelolaan yang baik oleh manajemen. Menurut FCGI (2006) masing-masing komite memiliki peranannya. Komite Remunerasi mempunyai peranan, yaitu membuat rekomendasi terhadap keputusan-keputusan yang menyangkut remunerasi/kompensasi untuk direksi dan kebijakan- kebijakan kompensasi lainnya, termasuk hubungan antara prestasi perusahaan dengan kompensasi bagi eksekutif perusahaan dalam hal ini CEO; Komite Nominasi yang mempunyai peranan yaitu mengawasi proses pencalonan komisaris dan direksi, menyeleksi para kandidat yang akan dicalonkan, dan mengusulkan kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur tentang struktur dewan dan proses nominasinya; dan Komite Audit yang mempunyai peranan memberikan suatu pandangan tentang masalah akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal serta auditor independen (Egon Zehnder International, 2000: p. 21) (FCGI, 2006).

Memasuki abad ke-21, tuntutan untuk penerapan *corporate governance* dalam pengelolaan perbankan sangat penting untuk segera dilakukan. Karena ditengah fenomena tumbuh dan berkembangnya perbankan di tanah air, upaya mewujudkan *corporate governance* pada bank sesungguhnya menjadi kata kunci yang amat menentukan kesuksesan perbankan di masa depan. Dalam perkembangan ekonomi dunia saat ini, fungsi dan peranan perbankan sebagai lembaga perantara keuangan (*intermediary financial institution*) sangatlah penting. Unsur kepercayaan masyarakat terhadap perbankan merupakan suatu hal yang sangat esensial, sehingga bank perlu menjaganya untuk mencegah adanya *rush* atau penarikan dana masyarakat secara besar-besaran seperti halnya yang terjadi pada saat krisis moneter 1997 dimana banyak bank yang kolaps, sehingga pemerintah terpaksa melakukan proses likuidasi terhadap sejumlah bank yang bermasalah. Atau beberapa tahun yang lalu

pada akhir tahun 2008 terjadi subprime mortgage di amerika dan berimbas pada Indonesia. Permasalahan perbankan perlu pemerintah yang menangani secara langsung dalam hal ini adalah Bank Indonesia (BI) dengan otoritas dan kewenangannya secara terus menerus melakukan pembenahan dan peningkatan fungsi dari lembaga keuangan. Salah satu upaya peningkatan fungsi dan peranan lembaga keuangan adalah dengan melakukan kebijakan yang dikenal dengan regulasi. Salah satu yang harus diterapkan secara komprehensif oleh perbankan adalah *corporate governance* (Wibowo, 2006). Persoalan *corporate governance* di industri perbankan tetap menjadi masalah krusial yang harus diperhatikan setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam industri itu. Oleh karena itu, dengan adanya pengelolaan perbankan yang baik melalui aplikasi *corporate governance* maka hal ini akan meningkatnya efisiensi perbankan dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi mengingat perbankan mempunyai sumbangan besar dalam perekonomian (Levine, 2004).

Mengapa terjadi kasus Barings Bank? Menurut Herlianto (2002), kasus itu terjadi karena lemahnya *compliance oriented supervision* yang digunakan. Begitu pula halnya dengan yang terjadi di tanah air, seperti kasus Bank Bali, Bank Duta yang melanggar prinsip-prinsip *corporate governance*, atau kasus pembekuan Unibank dan divestasi BCA yang menurut Sodik (2002) mengindikasikan pelaku bisnis masih main "kucing-kucingan" dengan *corporate governance*, dikarenakan sistem pengawasan yang dilakukan kalangan perbankan sangat buruk. Dengan ungkapan lain dapat dikatakan bahwa kurang optimalnya fungsi otoritas pengawas dalam memonitor praktik-praktik yang tidak sehat merupakan salah satu faktor yang menjadi kendala dalam mewujudkan *corporate governance* di bisnis perbankan (Arafat). Seiring dengan tuntutan penerapan *corporate governance* pada sektor perbankan, maka pada tahun 2006 Bank Indonesia menggagas peraturan yang secara khusus mengatur mengenai ketentuan pelaksanaan *corporate governance* di Bank Umum. Peraturan yang

dimaksud adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum yang kembali disempurnakan melalui PBI No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan Atas PBI No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.

Evaluasi Bank Indonesia terhadap 101 bank pada periode September 2007, menemukan bahwa 69,3% bank yang beroperasi di Indonesia belum mematuhi ketentuan CG (Muchammad Ghufon, 2008). Hasil penilaian Bank Indonesia menunjukkan 69 persen perbankan masih melanggar *good corporate governance*, terutama pelanggaran oleh bank-bank kecil swasta. Menurut Deputy Gubernur BI, pelanggaran yang terjadi terutama pada masalah komisaris independen dalam dewan komisaris. Kasus ini mencapai 53 persen. Selanjutnya pelanggaran dalam pembentukan komite mencapai 30,7 persen, tidak terpenuhinya jumlah komisaris independen sekitar 18 persen (www.unisosdem.org, 2007 dalam Kemalasari, 2009).

Menurut Cox dan Blake 1991, Robinson dan Dechant, 1997 (dalam Carter et al., 2003), adanya persebaran (*diversity*) dalam anggota dewan komisaris dipercaya dapat mempengaruhi nilai perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Persebaran dewan (*board diversity*) diduga memberikan dampak yang positif. Semakin besar persebaran dalam anggota dewan dapat menimbulkan semakin banyak konflik, namun persebaran tersebut dapat memberikan alternatif penyelesaian terhadap suatu masalah yang semakin beragam daripada anggota dewan yang homogen. Selain itu, keragaman dalam dewan direksi memberikan karakteristik yang unik bagi perusahaan yang dapat menciptakan nilai tambah. Telah banyak penelitian tentang persebaran anggota dewan komisaris yang

dilihat dari persentasi wanita dalam dewan, ras minoritas (African Americans, Asians dan Hispanics), proporsi *outside directors*, dll. Namun, penelitian akan persebaran anggota komite dewan komisaris belum ditemukan.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *corporate governance*, khususnya terhadap komite-komite dewan komisaris, yaitu komite audit, komite pemantau risiko, dan komite nominasi dan remunerasi di Indonesia dan untuk mengetahui keberadaan komite-komite dewan komisaris tersebut dibanding dengan aturan yang ada, yaitu Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 tentang penerapan *corporate governance* di Bank Umum dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Selain itu, juga bertujuan untuk mengetahui persebaran (*diversity*) anggota komite dewan komisaris.

Perbankan dipilih karena industri perbankan memegang peranan penting dalam sistem perekonomian bangsa. Perbankan merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat penting perannya dalam ekonomi Indonesia dikarenakan bank memiliki fungsi yang mendukung upaya peningkatan pembangunan suatu negara. Pembangunan nasional suatu negara mencakup didalamnya pembangunan ekonomi. Dalam pembangunan ekonomi diperlukan peran serta lembaga keuangan untuk membiayai, karena pembangunan sangat memerlukan tersedianya dana. Oleh karena itu keberadaan lembaga keuangan dalam pembiayaan pembangunan sangat diperlukan (Kuncoro dan Suhardjono, 2002:67, dalam Hanum, 2010).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka secara spesifik dapat dirumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *corporate governance* pada industri perbankan di Indonesia, khususnya terhadap komite-komite Dewan Komisaris dalam hal persebaran (*diversity*) anggota komite dewan komisaris.
2. Bagaimana keberadaan komite-komite Dewan Komisaris pada Industri Perbankan dibandingkan dengan aturan yang ada.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran tentang penerapan *corporate governance* dalam kaitannya dengan keberadaan komite-komite dewan komisaris.
2. Untuk meneliti keberadaan komite-komite Dewan Komisaris pada industri perbankan di Indonesia dibandingkan dengan aturan yang ada.

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan kepustakaan/referensi empiris mengenai hubungan antara keberadaan komite-komite Dewan Komisaris pada industri perbankan di Indonesia.

2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan, khususnya mengenai hubungan antara keberadaan komite-komite Dewan Komisaris pada industri perbankan di Indonesia.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Studi ini dilakukan dengan membatasi penelitian pada komite dewan komisaris pada industri perbankan yang telah go publik di Indonesia dalam rentang waktu 2007-2009. Adanya pembatasan ruang lingkup penelitian terjadi karena keterbatasan waktu, data, dan kemampuan penulis dalam mengakses data pada perbankan yang listed di BEI.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari lima bab, dimana bab satu dengan bab yang lainnya saling berhubungan. Uraian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori yang berhubungan dan mendukung penelitian ini, penelitian terdahulu, dan hipotesis yang dirumuskan untuk penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, populasi dan sample penelitian, variable penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, serta pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh beserta analisis statistik dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran yang dapat diberikan oleh peneliti dari hasil akhir penelitian untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi *Corporate Governance*

Istilah *corporate governance* dapat didefinisikan dari berbagai disiplin ilmu (Turnbull, 2000 dalam OEDC 2006); misalnya hukum, psikologi, ekonomi, manajemen, keuangan, akuntansi, filsafat bahkan dalam disiplin ilmu agama. Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai *Cadbury Report* (Tjager dkk., 2003). Terdapat banyak definisi tentang *corporate governance* yang pendefinisianya dipengaruhi oleh teori yang melandasinya. Perusahaan/korporasi dapat dipandang dari dua teori (dalam Arifin, 2005), yaitu (a) teori pemegang saham (*shareholding theory*), dan (b) teori stakeholder (*stakeholding theory*).

Shareholding theory mengatakan bahwa perusahaan didirikan dan dijalankan untuk tujuan memaksimalkan kesejahteraan pemilik/pemegang saham sebagai akibat dari investasi yang dilakukannya. *Shareholding theory* ini sering disebut sebagai teori korporasi klasik yang sudah diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Definisi *corporate governance* yang berdasar pada *shareholding theory* diberikan oleh Monks dan Minow (1995) yaitu hubungan berbagai partisipan (pemilik/investor dan manajemen) dalam menentukan arah dan kinerja korporasi. Definisi lain diajukan oleh Shleifer dan Vishny (1997) yang menyebutkan bahwa *corporate governance* sebagai cara atau mekanisme untuk meyakinkan para pemilik modal dalam memperoleh hasil (return) yang sesuai dengan investasi yang ditanamkan.

Stakeholding theory, diperkenalkan oleh Freeman (1984), menyatakan bahwa perusahaan adalah organ yang berhubungan dengan pihak lain yang berkepentingan, baik

yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Definisi stakeholder ini termasuk karyawan, pelanggan, kreditur, suplier, dan masyarakat sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi. Adapun definisi *corporate governance* dari Cadbury Committee yang berdasar pada teori stakeholder adalah sebagai berikut :

"A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees and internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities".

(Seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara para pemegang saham, manajer, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka).

Beberapa institusi Indonesia mengajukan definisi *corporate governance*, antara lain oleh FCGI (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*) tahun 2000 yang mendefinisikan *corporate governance* sama seperti Cadbury Committee, sedangkan *The Indonesian Institute for Corporate Governance* atau IICG (2000) mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder yang lain (Arifin, 2005).

Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai berikut:

"corporate governance is the system by which business corporations are directed and controlled. The Corporate Governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholders, and other stakeholders, and spells out the rules and procedures for making decisions on corporate affairs. By doing this, it also provides this structure through which the company objectives are set, and the means of attaining those objectives and monitoring performance"

OECD melihat *Corporate Governance* sebagai suatu sistem dimana sebuah perusahaan atau entitas bisnis diarahkan dan diawasi. Sejalan dengan itu, maka struktur dari *Corporate*

Governance menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain Dewan Komisaris dan Direksi, Manajer, Pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai stakeholders. Selanjutnya, struktur dari *Corporate Governance* juga menjelaskan bagaimana aturan dan prosedur dalam pengambilan dan pemutusan kebijakan sehingga dengan melakukan itu semua maka tujuan perusahaan dan pemantauan kinerjanya dapat dipertanggungjawabkan dan dilakukan dengan baik (Tim Studi OECD, 2006).

Dari beberapa pengertian di atas, beberapa aspek penting dari *corporate governance* meliputi :

- a) Adanya keseimbangan hubungan antara organ-organ perusahaan, diantaranya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), komisaris dan direksi, yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme operasional ketiga organ perusahaan tersebut (keseimbangan internal).
- b) Adanya pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada seluruh *stakeholders*, yang meliputi hal-hal yang terkait dengan pengaturan hubungan antara perusahaan dengan *stakeholders* (keseimbangan eksternal).
- c) Adanya hak-hak pemegang saham untuk mendapat informasi yang tepat dan benar pada waktu yang diperlukan mengenai perusahaan dan hak berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perkembangan strategis dan perubahan mendasar atas perusahaan serta ikut menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam pertumbuhannya.

- d) Adanya perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing melalui keterbukaan informasi yang material dan relevan serta melarang penyampaian informasi untuk pihak sendiri yang bisa menguntungkan orang dalam (*insider information for insider trading*). (www.madaniri.com, dalam Mintara, 2008)

Di dalam *corporate governance* terdapat struktur *governance*, yang dapat diartikan sebagai suatu kerangka dalam organisasi untuk menerapkan berbagai prinsip *governance* sehingga prinsip tersebut dapat dibagi, dijalankan serta dikendalikan. Secara spesifik, struktur *governance* harus didesain untuk mendukung jalannya aktivitas organisasi secara bertanggung-jawab dan terkendali. Pada dasarnya struktur *governance* diatur oleh Undang-undang sebagai dasar legalitas berdirinya sebuah entitas. Misalnya dalam model Anglo-Saxon, struktur *governance* akan terdiri dari RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), *Board of Directors* (representasi dari para pemegang saham/pemilik), serta *Executive managers* (manajemen yang akan menjalankan aktivitas). Model Anglo-Saxon ini disebut dengan *Single-board system* yaitu struktur CG yang tidak memisahkan keanggotaan dewan komisaris dan dewan direksi. Dalam sistem ini anggota dewan komisaris juga merangkap anggota dewan direksi dan kedua dewan ini disebut sebagai *board of directors*. Perusahaan-perusahaan di Inggris dan Amerika serta negara-negara lain umumnya berbasis *single-board system* yang dipengaruhi langsung oleh model Anglo-Saxon.

Sedangkan untuk model Continental Europe, struktur *governance* terdiri dari RUPS, Dewan Komisaris, Dewan Direktur, dan Manajer Eksekutif (manajemen). Struktur semacam ini disebut *Two-board system*, yaitu struktur CG yang dengan tegas memisahkan keanggotaan dewan, yakni antara keanggotaan dewan komisaris sebagai pengawas dan dewan direksi

sebagai eksekutif perusahaan. Dalam model *two-board system*, RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) merupakan struktur tertinggi yang mengangkat dan memberhentikan dewan komisaris yang mewakili para pemegang saham untuk melakukan kontrol terhadap manajemen. Dewan komisaris membawahi langsung dewan direksi dan mempunyai kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan dewan direksi serta melakukan tugas pengawasan terhadap kegiatan direksi dalam menjalankan perusahaan. Posisi dewan komisaris dalam model ini relatif kuat terhadap direksi sehingga fungsi pengendalian/kontrol terhadap kegiatan manajemen dapat berjalan dengan efektif. Perusahaan-perusahaan di Indonesia pada umumnya berbasis *two-board system* atau *two-tier board system* seperti kebanyakan perusahaan di Eropa (model Continental Europe).

Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol/pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi (Walsh dan Seward, 1990). Walsh dan Seward (1990) menyatakan bahwa terdapat 2 mekanisme untuk membantu menyamakan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer dalam rangka penerapan CG, yaitu: (1) mekanisme pengendalian internal perusahaan, dan (2) mekanisme pengendalian eksternal berdasarkan pasar.

Mekanisme pengendalian internal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan dengan membuat seperangkat aturan yang mengatur tentang mekanisme bagi hasil, baik yang berupa keuntungan, return maupun risiko-risiko yang disetujui oleh prinsipal dan agen. Salah satu pilihan mekanisme pengendalian internal untuk menyamakan kepentingan pemegang

saham dan manajer adalah kontrak insentif jangka panjang (Walsh dan Seward, 1990; Jensen, 1993 dalam Arifin, 2005).

Mekanisme pengendalian eksternal adalah pengendalian perusahaan yang dilakukan oleh pasar. Menurut teori pasar untuk pengendalian perusahaan (*market for corporate control*), pada saat diketahui bahwa manajemen berperilaku menguntungkan diri sendiri, kinerja perusahaan akan menurun yang direfleksikan oleh nilai saham perusahaan. Pada kondisi tersebut, kelompok manajer lain akan menggantikan manajer yang sedang memegang jabatan. Dengan demikian bekerjanya *market for corporate control* bisa menghambat tindakan menguntungkan diri manajer sendiri (Jensen dan Meckling, 1976, dalam Arifin, 2005).

Dengan buruknya pelaksanaan *corporate governance*, maka tingkat kepercayaan para pemilik modal menjadi menurun karena investasi yang mereka lakukan menjadi tidak aman. Hal ini tentu akan diikuti dengan tindakan penarikan atas investasi yang sudah ditanamkan, sementara investor baru juga enggan untuk melakukan investasi (Maksum, 2005). Sistem *corporate governance* yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan perolehan kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, sistem tersebut harus juga membantu menciptakan lingkungan yang kondusif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan.

2.2 Corporate Governance pada Perbankan

Secara sepintas nampaknya penerapan *Corporate Governance* di bank umum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya, akan tetapi tidaklah demikian halnya. *Corporate*

Governance pada lembaga keuangan, khususnya bank memiliki keunikan bila dibandingkan *governance* pada lembaga keuangan non bank. Dalam banyak perilaku manajer dan pemilik bank merupakan faktor utama yang memerlukan perhatian dalam penerapan *Corporate Governance*. Dalam banyak hal konsep teori keagenan (*agency theory*) yang sering digunakan dalam penerapan *Corporate Governance* tidak sepenuhnya dapat digunakan dalam industri perbankan.

Ross Levine sebagaimana dikutip oleh Leo J. Susilo dan Karlen Simarmata (2007:63) menyatakan bahwa bank pada dasarnya mempunyai dua ciri khas yang tidak terdapat pada jenis industri lainnya yaitu:

1. Informasi Asimetri dalam Industri Perbankan

Informasi yang asimetri pada industri perbankan mempunyai dimensi dan kompleksitas yang lebih tinggi dari industri lainnya. Asimetri ini terjadi diantara deposan, manajer bank, pengurus bank, debitor, pemilik/pemegang saham, bank dan regulator. Semakin besar informasi asimetri antara pihak luar bank dan pihak dalam bank, maka akan semakin sulit bagi pihak luar untuk memonitor kinerja *governance* bank. Hal ini menjadi semakin sulit karena deposan dan debitor yang sangat banyak jumlahnya dan tersebar (*diffuse*). Bila jumlah pemegang saham juga banyak dan tersebar, maka kompleksitasnya akan semakin bertambah. Bila terdapat pemegang saham pengendali yang dominan, pengendalian manajemen akan lebih mudah, akan tetapi juga terdapat bahaya adanya *misconduct*, *fraud* atau penyalahgunaan bank dan dana masyarakat untuk kepentingan pribadi atau kelompok usahanya. Informasi keuangan yang asimetri ini adalah sumber risiko yang tinggi, baik risiko kredit, risiko

operasional maupun risiko hukum serta menjadi salah satu sumber utama terjadinya kejahatan perbankan.

2. Peran Regulasi dalam *Corporate Governance* Perbankan

Peran regulator dalam industri perbankan adalah melakukan kebijakan pengaturan dan pengawasan untuk mewujudkan stabilitas ekonomi nasional yang berkelanjutan melalui sistem kelembagaan perbankan yang lebih kuat, efisien dan bermanfaat. Aturan *corporate governance* dalam industri umumnya bersifat sukarela (*voluntary*) dan tidak mencampuri urusan proses *governance* perusahaan tersebut. Dalam industri perbankan regulasi yang ada mempengaruhi proses *governance* bank secara langsung dan merupakan hal yang harus dipatuhi, karena dinyatakan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pelanggaran terhadap regulasi tersebut merupakan pelanggaran kepatuhan dan mempunyai ancaman sanksi hukum.

Penerapan *corporate governance* perbankan dianggap unik karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan keuangan jenis lain maupun perusahaan non keuangan. Keunikan perbankan terutama dilihat dari neraca yaitu aset perbankan rata-rata adalah kredit yang sebagian besar bersifat jangka panjang, sedangkan sisi *liabilities* adalah tabungan dan deposito yang memiliki sifat jangka pendek. Pengelolaan yang tidak hati-hati akan menyebabkan terjadinya mismatch antara aktiva dan pasiva. Terjadinya *mismatch* dapat menyebabkan pembukuan negatif bagi bank. Penyaluran kredit kepada pihak terkait dapat bersifat positif jika keterkaitan itu meminimalkan risiko dan sebaliknya akan bersifat negatif jika justru menambah risiko gagal bayar akibat terjadinya moral hazard. Bagaimanapun, CG menjadi kental ketika ada persinggungan kepentingan antara pemilik dan manajemen (Rokhim, 2006).

2.3 Dewan Komisaris

Dewan komisaris dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Peran komisaris ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham. Oleh karena itu dewan komisaris seharusnya dapat mengawasi kinerja dewan direksi sehingga kinerja yang dihasilkan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dewan komisaris memegang peranan penting dalam mengarahkan strategi dan mengawasi jalannya perusahaan serta memastikan bahwa para manajer benar-benar meningkatkan kinerja perusahaan sebagai bagian daripada pencapaian tujuan perusahaan. Yang terpenting dalam hal ini adalah kemandirian komisaris dalam pengertian bahwa dewan komisaris harus memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan manajemen, dilengkapi dengan informasi yang memadai untuk mengambil keputusan, dan berpartisipasi secara aktif dalam penetapan agenda dan strategi. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Egon Zehnder International, 2000 dalam Sam'ani, 2008).

Dewan komisaris merupakan salah satu organ perusahaan yang turut berperan dan bertanggung jawab dalam menjamin terwujudnya implementasi sistem *corporate governance* yang baik dan efektif pada suatu perusahaan. Anggapan ini sesungguhnya dikaitkan dengan fungsi utama dari dewan komisaris itu sendiri, yaitu sebagai pengawas dari segala tindakan dan keputusan yang dibuat oleh direksi (Andayani, 2001 dalam Suryani, 2010).

Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan. Hal ini penting mengingat

adanya kepentingan dari manajemen untuk melakukan manajemen laba yang berdampak pada berkurangnya kepercayaan investor. Untuk mengatasinya dewan komisaris diperbolehkan untuk memiliki akses pada informasi perusahaan. Dewan komisaris tidak memiliki otoritas dalam perusahaan, maka dewan direksi bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi terkait dengan perusahaan kepada dewan komisaris (NCCG, 2001 dalam Sam'ani 2008). Selain mensupervisi dan memberi nasihat pada dewan direksi sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007, fungsi dewan komisaris yang lain sesuai dengan yang dinyatakan dalam *National Code for Good Corporate Governance* 2001 adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder perusahaan sebaik memonitor efektifitas pelaksanaan *corporate governance* (Sam'ani, 2008).

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Corporate Governance* bagi Bank Umum dalam pasal 12 menyatakan:

- 1) dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang:
 - a) Komite Audit
 - b) Komite Pemantau Resiko
 - c) Komite Remunerasi dan Komite Nominasi
- 2) Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Remunerasi dan Komite Nominasi secara terpisah.

2.3.1 Komite Audit

Berbicara mengenai komite audit, hal yang sangat mendasar adalah terkait dengan *corporate accountability* yakni peran dan tanggung jawab perusahaan dalam menjamin keseimbangan kepentingan manajemen, pemegang saham, dan kepentingan non pemegang saham lainnya. Akuntabilitas ini merupakan salah satu dari empat unsur penting dalam *corporate governance* yakni keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan pertanggungjawaban (*responsibility*).

Komite audit menjadi sangat penting bagi proses audit. Menurut Braiotta, (2004 dalam Adrian, 2007) komite audit dibentuk untuk tujuan membantu komisaris agar lebih efektif dalam menjalankan tugasnya yang berhubungan dengan pihak manajemen, internal auditor perusahaan, dan juga pihak eksternal auditor. Komite audit diharapkan bisa membantu komisaris dalam pengawasan terhadap perusahaan dan kebijakan direksi. Komite audit bisa melakukan analisis terhadap laporan manajemen dan menyampaikannya kepada komisaris sebagai bahan rapat komisaris. *The Corporate Organization Policy Committee of Business Roundtable* menyimpulkan bahwa komisaris harus dibantu oleh komite audit karena anggota komite bisa lebih fokus perhatiannya terhadap permasalahan perusahaan secara lebih mendalam dibanding komisaris (Braiotta, 2004 dalam Adrian, 2007)

Komite audit yang bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen yang melakukan manajemen laba (*earnings management*) dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal.

Penelitian mengenai komite audit ada yang mengindikasikan kurang efektifnya keberadaan komite audit sebagai salah satu praktek *corporate governance* di perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI. Mayangsari (2003) meneliti pengaruh keberadaan komite audit terhadap integritas laporan keuangan, disimpulkan bahwa keberadaan komite audit berhubungan negatif dengan integritas laporan keuangan. Sedangkan Nuryanah (2004) dalam Effendi (2005) menemukan bahwa komite audit tidak mempengaruhi nilai perusahaan secara signifikan. Namun Effendi (2005) menyimpulkan adanya peranan komite audit dalam meningkatkan kinerja perusahaan, terutama dari aspek pengendalian (Sam'ani, 2008).

Bapepam melalui surat edaran No.SE-03/PM/2000 merekomendasikan perusahaan publik untuk membentuk komite audit. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kinerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan. Komite audit lebih lanjut diatur dalam Kep-339/BEJ/07-2001 yang mengharuskan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki komite audit (Anggarini, 2010).

Peraturan Terkait di Indonesia mengenai komite audit yaitu Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Di dalam peraturan tersebut, dijelaskan Tugas dan tanggung jawab Komite Audit, antara lain:

- 1) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan perusahaan.
- 2) Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan atas peraturan perundang-undangan di pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 3) Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal.

- 4) Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
- 5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten. Menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi perusahaan.
- 6) Membuat pedoman kerja komite audit (*audit committee charter*)

Selain itu, di dalam peraturan tersebut juga dijelaskan jumlah minimal Komite Audit, yaitu minimal 3 orang, dengan ketentuan:

- Minimal 1 orang komisaris independen, sebagai Ketua Komite Audit
- Minimal 2 orang pihak independen dari luar emiten

Selain itu, Salah seorang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan dan Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum pasal 43, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit, yaitu:

- (1) Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komite Audit paling kurang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

- a) pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern;
- b) kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku;
- c) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku;
- d) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, akuntan publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia,

guna memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris.

- (3) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Pasal 38, menyatakan:

- 1) Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling kurang terdiri dari:
 - a) seorang Komisaris Independen;
 - b) seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi; dan
 - c) seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.
- 2) Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen.
- 3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- 4) Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit.
- 5) Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

Menurut Surat Edaran No. 9/12/DPNP kepada Semua Bank Umum di Indonesia

Perihal : Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, dinyatakan bahwa:

“Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.”

2.3.2 Komite Pemantau Resiko

Komite pemantau resiko berfungsi Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian berkala serta memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan jenis resiko usaha serta langkah antisipatif, dengan cara mengkaji prosedur pengendalian risiko yang dilakukan oleh direksi dan manajemen. Disamping itu, Komite Pemantau Risiko juga melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Corporate Governance* bagi Bank Umum pasal 44, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko, yaitu

Komite Pemantau Risiko paling kurang melakukan:

- a) evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
- b) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, guna memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Pasal 39, menyatakan:

- 1) Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b paling kurang terdiri dari:
 - a) seorang Komisaris Independen;
 - b) seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan
 - c) seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
- 2) Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen.
- 3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.
- 5) Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki integritas, akhlak, dan moral yang baik.

Menurut Surat Edaran No. 9/12/DPNP kepada Semua Bank Umum di Indonesia

Perihal : Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, dinyatakan bahwa:

“Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.”

2.3.3 Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite remunerasi berfungsi membantu Dewan komisaris dalam menyusun sistem penggajian dan tunjangan dengan terlebih dahulu mengevaluasi kinerja material. Tugas dan tanggung jawab komite remunerasi diantaranya melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai:

- a) Kebijakan remunerasi bagi dewan komisaris dan direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b) Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada direksi.

Sedangkan Komite Nominasi berfungsi dalam menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi anggota Komisaris dan direksi serta eksekutif lainnya, membuat sistem penilaian, memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota komisaris dan direksi untuk perusahaan yang bersangkutan. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi terkait dengan kebijakan nominasi adalah:

- a) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan komisaris dan direksi kepada dewan komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

- b) Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum pasal 45, Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi, yaitu:

Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:

- a) terkait dengan kebijakan remunerasi:

- 1) melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi ; dan
- 2) memberikan rekomendasi kepada dewan Komisaris mengenai:
 - a. kebijakan remunerasi bagi dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b. kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;

- b) terkait dengan kebijakan nominasi:

- 1) menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 2) memberikan rekomendasi mengenai calon anggota dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

- 3) memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 39 ayat (1) huruf b dan huruf c kepada dewan Komisaris.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum pasal 40, menyatakan:

- 1) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c paling kurang terdiri dari:
 - a) seorang Komisaris Independen;
 - b) seorang Komisaris; dan
 - c) seorang Pejabat Eksekutif.
- 2) Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen.
- 3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 4) Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum pasal 41 Dalam hal Bank membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi secara terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) maka keanggotaan masing-masing komite tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 40.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum pasal 40, menyatakan:

- (1) Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c paling kurang terdiri dari :
 - a) seorang Komisaris Independen;
 - b) seorang Komisaris; dan
 - c) seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.
- (2) Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen.
- (3) Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.

Menurut Surat Edaran No. 9/12/DPNP kepada Semua Bank Umum di Indonesia Perihal : Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, dinyatakan bahwa:

“Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen selaku Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Komisaris dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai. Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai yang menjadi anggota Komite, harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan Bank. Dalam hal Bank membentuk Komite tersebut secara terpisah maka Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Remunerasi harus memiliki pengetahuan mengenai sistem remunerasi Bank dan Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite Nominasi harus memiliki pengetahuan tentang sistem nominasi dan succession plan Bank.”

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yaitu data yang tidak dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Data penelitian ini berupa *annual report* yang diterbitkan oleh perusahaan perbankan *go public* selama tahun 2007 sampai 2009 yang diperoleh melalui website www.idx.co.id. Data penelitian yang mencakup data periode 2007-2009 dipandang cukup mewakili kondisi kepatuhan perbankan di Indonesia pada saat itu, yaitu terhadap kepatuhan akan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 tentang penerapan *corporate governance* di Bank Komersial.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang beroperasi di Indonesia berturut-turut dari tahun 2007-2009 yang berjumlah 87 perusahaan. Pemilihan populasi diambil dari bank publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang memiliki kriteria tertentu. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut :

1. terdaftar sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara berturut-turut yang mempublikasikan laporan keuangan selama periode 2007 sampai dengan 2009;
2. perusahaan yang bergerak pada sektor perbankan;
3. terdapat kelengkapan data yang dibutuhkan dari tahun 2007 hingga 2009.

3.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah berbentuk studi eksploratif kualitatif. Menurut Sekaran (2006), studi eksploratif dilakukan jika tidak banyak yang diketahui mengenai situasi yang dihadapi, atau tidak ada informasi yang tersedia mengenai bagaimana masalah atau isu penelitian yang mirip diselesaikan di masa lalu. Intinya, studi eksploratif dilakukan untuk memahami dengan lebih baik sifat masalah karena mungkin baru sedikit studi yang telah dilakukan dalam bidang tersebut.

3.4 Defenisi Variabel dan Pengukurannya

Menurut Sekaran (2006), variabel adalah apapun yang dapat membedakan atau membawa variasi pada nilai. Variabel dalam penelitian ini ada 3, yaitu:

- Komite Audit
 - 1) Persebaran anggota komite audit

Untuk mengetahui persebaran tentang kondisi komite audit, berikut adalah ketentuannya:

1. Keberadaan komite audit. Pengukurannya yaitu jika ada maka dinilai 1 dan jika tidak ada maka dinilai 0.
2. Karakteristik
 - Gender: diukur dengan pria atau wanita (P/W)
 - Edukasi: diukur dengan $\leq S1$ atau $S2 \geq$
 - Usia: diukur dengan ≤ 40 tahun atau $40 \geq$
 - Latar belakang pendidikan: diukur dengan anggota dewan yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis atau tidak.

2) Penerapan *Corporate Governance*

Item komite audit dalam penelitian berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 tentang penerapan *corporate governance* di Bank Komersial, Surat Edaran No. 9/12/DPNP kepada Semua Bank Umum di Indonesia. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, diteliti tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan-peraturan tersebut tentang Komite Audit. Berikut penjelasannya:

- 1) Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, dijelaskan jumlah minimal Komite Audit, yaitu minimal 3 orang, dengan ketentuan:
 - o Minimal 1 orang komisaris independen → Ketua Komite Audit
 - o Minimal 2 orang pihak independen dari luar emiten

- 2) Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 tentang penerapan *corporate governance* di Bank Komersial, dan Surat Edaran No. 9/12/DPNP kepada Semua Bank Umum di Indonesia, dijelaskan:

No.	Ket.	Ada / Tidak
1)	Anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling kurang terdiri dari: a) seorang Komisaris Independen; b) seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi; dan c) seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.	
2)	Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen.	
3)	Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
4)	Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Audit	
	Kesimpulan: memenuhi seluruh peraturankah?	Ya / Tidak

Semua peraturan (dari no.1 sampai no.4) diatas wajib dipatuhi oleh perusahaan. kemudian diukur dengan memberikan penilaian “Ya” jika semua peraturan dipatuhi dan “Tidak” jika ada yang belum dipatuhi, maka rumusannya (Supranto,1999) :

$$= \frac{\text{Perusahaan dengan kategori "Ya"}}{\text{Jumlah perusahaan tahun n}} \times 100\%$$

Selanjutnya, menurut Nurhajjah (2008) ukuran persentase rendah, sedang dan tinggi untuk menilai suatu kategori sebagai berikut :

- Rendah, apabila persentase perusahaan “Ya” sebanyak 0%-40%

- Sedang, apabila persentase perusahaan “Ya” sebanyak 41%-70%
- Tinggi, apabila persentase perusahaan “Ya” sebanyak 71%-100%
- Komite Pemantau Resiko

1) Persebaran Anggota Komite Pemantau Resiko

Untuk mengetahui persebaran (*diversity*) tentang kondisi komite pemantau risiko, berikut adalah ketentuannya:

1. Keberadaan komite pemantau risiko

Pengukurannya yaitu Jika ada maka dinilai 1 dan jika tidak ada maka dinilai 0.

2. Karakteristik

- Gender: diukur dengan pria atau wanita (P/W)
- Edukasi: diukur dengan $\leq S1$ dan $S2 \geq$
- Usia: diukur dengan ≤ 40 tahun atau $40 \geq$
- Latar belakang pendidikan: diukur dengan anggota dewan yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis atau tidak.

2) Penerapan *Corporate Governance*

Item Komite Pemantau Resiko dalam penelitian berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 tentang penerapan *corporate governance* di Bank Komersial dan Surat Edaran No. 9/12/DPNP kepada Semua Bank Umum di Indonesia. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, diteliti tingkat kepatuhan perusahaan terhadap

peraturan-peraturan tersebut tentang Komite Pemantau Risiko. Berikut penjelasannya:

No.	Ket.	Ada / Tidak
1)	Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b paling kurang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a) seorang Komisaris Independen; b) seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan; dan c) seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. 	
2)	Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen.	
3)	Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
4)	Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota Komite Pemantau Risiko.	
	Kesimpulan: memenuhi seluruh peraturankah?	Ya / Tidak

Semua peraturan (dari no.1 sampai no.4) diatas wajib dipatuhi oleh perusahaan. kemudian diukur dengan memberikan penilaian “Ya” jika semua peraturan dipatuhi dan “Tidak” jika ada yang belum dipatuhi, maka rumusannya (Supranto,1999) :

$$= \frac{\text{Perusahaan dengan kategori "Ya"}}{\text{Jumlah perusahaan tahun n}} \times 100\%$$

Selanjutnya, menurut Nurhajjah (2008) ukuran persentase rendah, sedang dan tinggi untuk menilai suatu kategori sebagai berikut :

- Rendah, apabila persentase perusahaan “Ya” sebanyak 0%-40%
- Sedang, apabila persentase perusahaan “Ya” sebanyak 41%-70%

- Tinggi, apabila persentase perusahaan “Ya” sebanyak 71%-100%
- Komite Nominasi dan Remunerasi

1) Persebaran Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk mengetahui persebaran tentang kondisi komite nominasi dan remunerasi, berikut adalah ketentuannya:

1. Ada / tidak

Pengukurannya yaitu Jika ada maka dinilai 1 dan jika tidak ada maka dinilai 0.

2. Karakteristik

- Gender: diukur dengan pria atau wanita (P/W)
- Edukasi: diukur dengan $\leq S1$ dan $S2 \geq$
- Usia: diukur dengan ≤ 40 tahun atau $40 \geq$
- Latar belakang pendidikan: diukur dengan anggota dewan yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis atau tidak.

2) Penerapan *Corporate Governance*

Item Komite Nominasi dan Remunerasi dalam penelitian berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 tertanggal 5 Oktober 2006 tentang penerapan *corporate governance* di Bank Komersial dan Surat Edaran No. 9/12/DPNP kepada Semua Bank Umum di Indonesia. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, diteliti tingkat kepatuhan

perusahaan terhadap peraturan-peraturan tersebut tentang Komite Nominasi dan Remunerasi. Berikut penjelasannya:

No.	Ket.	Ada / Tidak
1)	Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b paling kurang terdiri dari: a) seorang Komisaris Independen; b) seorang Komisaris; dan c) seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.	
2)	Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Komisaris Independen.	
3)	Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
4)	Dalam hal anggota Komite Remunerasi dan Nominasi ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah 2 (dua) orang.	
	Kesimpulan: memenuhi seluruh peraturankah?	Ya / Tidak

Semua peraturan (dari no.1 sampai no.4) diatas wajib dipatuhi oleh perusahaan. kemudian diukur dengan memberikan penilaian “Ya” jika semua peraturan dipatuhi dan “Tidak” jika ada yang belum dipatuhi, maka rumusannya (Supranto,1999) :

$$= \frac{\text{Perusahaan dengan kategori "Ya"}}{\text{Jumlah perusahaan tahun n}} \times 100\%$$

Selanjutnya, menurut Nurhajah (2008) ukuran persentase rendah, sedang dan tinggi untuk menilai suatu kategori sebagai berikut :

- Rendah, apabila persentase perusahaan “Ya” sebanyak 0%-40%
- Sedang, apabila persentase perusahaan “Ya” sebanyak 41%-70%
- Tinggi, apabila persentase perusahaan “Ya” sebanyak 71%-100%

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Data dan Pembahasan Komite Audit

4.1.1 Persebaran Komite Audit

Hasil studi dari jumlah perusahaan yang telah membentuk komite audit di perusahaannya, dalam rangka untuk membantu dewan komisaris, yaitu: pada tahun 2007, dari 21 sampel perusahaan, 100% perusahaan telah membentuk komite audit di perusahaannya; begitu juga pada tahun 2008, dari 24 sampel perusahaan, 100% perusahaan tersebut telah membentuk komite audit; dan pada tahun 2009, dari 27 sampel perusahaan, 100% juga telah membentuk komite audit.

Tabel 4.1
Jumlah Pembentukan Komite Audit

	Jumlah Perusahaan
Tahun 2007	100% (dari 21 sampel)
Tahun 2008	100% (dari 24 sampel)
Tahun 2009	100% (dari 27 sampel)

Selanjutnya, hasil studi dari kategori gender yang menduduki posisi sebagai anggota komite audit, yaitu: pada tahun 2007 dari 19 sampel perusahaan, terdiri dari 87,37% pria dan 12,63% wanita; pada tahun 2008 dari 23 sampel perusahaan, terdiri dari 85,47% pria dan 10,19% wanita; dan pada tahun 2009 dari 25 sampel perusahaan, terdiri dari 93,53% pria dan 6,47% wanita yang menduduki posisi sebagai komite audit.

Tabel 4.2
Gender dalam Komite Audit

	Gender	
	Pria	Wanita
Tahun 2007	87,37%	12,63%
Tahun 2008	85,47%	10,19%
Tahun 2009	93,53%	6,47%

Terlihat dalam tabel bahwa persentase wanita dalam komite audit lebih kecil dibanding pria. Hal ini mungkin disebabkan karena faktor wanita memiliki sikap kehati-hatian yang tinggi, cenderung menghindari risiko, kurang menyukai risiko dibanding pria, sehingga wanita memiliki persentasi rendah dalam beberapa jabatan daripada pria. Merujuk pada Data statistik Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukkan bahwa jumlah penduduk wanita yang bekerja tahun 2005 dalam jenis pekerjaan tenaga kepemimpinan adalah sebanyak 37.801 jiwa (13%) dari total 290.464 penduduk yang bekerja sebagai tenaga kepemimpinan (<http://www.nakertrans.go.id>).

Untuk mengetahui kecenderungan peningkatan/penurunan jumlah wanita di dalam posisi komite audit, maka diperlukan sampel perusahaan yang memiliki data yang dibutuhkan berturut-turut dari 2007 - 2009. Sehingga terdapat 16 sampel perusahaan. Hasil studi yaitu Pada tahun 2007, anggota komite terdiri dari 91,25% pria dan 8,75% wanita; pada tahun 2008, anggota komite terdiri dari 91,46% pria dan 8,54% wanita; dan pada tahun 2009, anggota komite terdiri dari 91,46% pria dan 8,54% wanita.

Tabel 4.3
Trend Gender dalam Komite Audit

	Gender	
	Pria	Wanita
Tahun 2007	91,25%	8,75%
Tahun 2008	91,46%	8,54%
Tahun 2009	91,46%	8,54%

Terlihat dalam tabel bahwa jumlah wanita yang menduduki posisi komite audit pada tahun 2008 menurun, hal ini mungkin disebabkan karena faktor posisi komite audit memiliki risiko yang tinggi, sedangkan wanita cenderung untuk menghindari risiko, oleh karena itu persentasi wanita mengalami penurunan.

Selanjutnya hasil studi dari kategori tingkat edukasi yang menduduki posisi sebagai anggota komite audit, yaitu: pada tahun 2007 dari 11 sampel perusahaan, sebanyak 72,12% dari $\leq S1$ dan 27,88% dari $S2 \geq$; pada tahun 2008 dari 15 sampel perusahaan, sebanyak 67,13% berasal dari $\leq S1$ dan 32,87% dari $S2 \geq$; dan pada tahun

2009 dari 17 sampel perusahaan, sebanyak 68,14% dari $\leq S1$ dan 31,86% dari $S2 \geq$ menduduki posisi sebagai anggota komite audit.

Tabel 4.4
Tingkat Edukasi dalam Komite Audit

	Tingkat Edukasi	
	$\leq S1$	$S2 \geq$
Tahun 2007	72,12%	27,88%
Tahun 2008	67,13%	32,87%
Tahun 2009	68,14%	31,86%

Terlihat dalam tabel bahwa tingkat $S2 \geq$ lebih kecil dibandingkan $S1 \leq$, hal ini mungkin disebabkan karena masih jumlah $S2 \geq$ di Indonesia masih kurang. Selain itu Kusumastuti (2005) dalam Nurudin (2004) menyebutkan bahwa penelitian dari Harvard University di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa kesuksesan tidak semata-mata ditentukan oleh pengetahuan akademis tinggi dan keterampilan teknis (*hard skill*), tetapi oleh keterampilan mengelola diri dan orang lain (*soft skill*). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% dengan *hard skill* dan sisanya 80% dengan *soft skill*. Pemahaman dari istilah *hard skill* adalah skill yang dapat menghasilkan sesuatu sifatnya *visible* dan *immediate*. Tidak seperti *hard skill*, *soft skill* bersifat *invisible* dan tidak segera. *Soft skill* meliputi interaksi dengan kehidupan orang lain. Contoh *soft skill* antara lain: kemampuan beradaptasi, komunikasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, *conflict resolution*.

Untuk mengetahui kecenderungan peningkatan/penurunan jumlah $S2 \geq$ di dalam posisi komite audit, maka diperlukan sampel perusahaan yang memiliki data yang dibutuhkan berturut-turut dari 2007-2009. Sehingga terdapat 7 sampel perusahaan. Hasil studi yaitu Pada tahun 2007, anggota komite terdiri dari 75,24% $\leq S1$ dan 24,76% $\geq S2$; pada tahun 2008, anggota komite terdiri dari 82,14% $\leq S1$ dan 17,86% $S2 \geq$; dan pada tahun 2009, anggota komite terdiri dari 82,14% $\leq S1$ dan 17,86% $S2 \geq$.

Tabel 4.5
Trend Tingkat Edukasi dalam Komite Audit

	Gender	
	$\leq S1$	$S2 \geq$
Tahun 2007	75,24%	24,76%
Tahun 2008	82,14%	17,86%
Tahun 2009	82,14%	17,86%

Terlihat dalam tabel bahwa jumlah $S2 \geq$ yang menduduki posisi komite audit pada tahun 2008 menurun, hal ini mungkin disebabkan karena bahwa kesuksesan tidak semata-mata ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan teknis (*hard skill*), tetapi oleh keterampilan mengelola diri dan orang lain (*soft skill*). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% dengan *hard skill* dan sisanya 80% dengan *soft skill*. Walau tingkat edukasi $\leq S1$, namun untuk meningkatkan kemampuannya juga sering ikut dalam seminar-seminar, workshop-workshop, dan pelatihan-pelatihan. Selain itu, rata-rata anggota komite juga telah memiliki pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman. Dimana pengetahuan akan memberikan kontribusi yang baik jika didukung dengan pengalaman yang memadai.

Selanjutnya hasil studi dari kategori tingkat usia yang menduduki posisi sebagai anggota komite audit, yaitu: pada tahun 2007 dari 14 sampel perusahaan, sebanyak 2,38% dari ≤ 40 dan 97,62% dari $40 \geq$; pada tahun 2008 dari 18 sampel perusahaan, sebanyak 1,85% berasal dari ≤ 40 dan 98,15% dari $40 \geq$; dan pada tahun 2009 dari 20 sampel perusahaan, sebanyak 2,5% dari ≤ 40 dan 97,5% dari $40 \geq$ menduduki posisi sebagai anggota komite audit.

Tabel 4.6
Tingkat Usia dalam Komite Audit

	tingkat usia	
	≤ 40	$40 \geq$
Tahun 2007	2,38%	97,62%
Tahun 2008	1,85%	98,15%
Tahun 2009	2,5%	97,5%

Terlihat dalam tabel bahwa persentase tingkat usia $40 \geq$ lebih tinggi dibanding $40 \leq$, hal ini disebabkan karena faktor-faktor yaitu pada usia $40 \geq$ merupakan masa ketika orang mencapai dan mempertahankan kepuasan dalam karirnya, mereka

cenderung fokus terhadap pekerjaan daripada berpindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. usia anggota dewan berkaitan dengan kebijaksanaan yang dimiliki. Semakin bertambah usia, semakin bijaksana seseorang. Selain itu, para pekerja yang lebih tua biasanya memperlihatkan lebih banyak kesetiaan kepada perusahaan daripada pekerja yang masih muda (kusumastuti, 2005).

Selanjutnya hasil studi dari kategori tingkat latar belakang pendidikan yang menduduki posisi sebagai anggota komite audit, yaitu: pada tahun 2007 dari 13 sampel perusahaan, sebanyak 87,56% dari ekonomi & bisnis dan 9,87% dari non ekonomi & bisnis; pada tahun 2008 dari 18 sampel perusahaan, sebanyak 76,03% berasal dari ekonomi & bisnis dan 22,12% dari non ekonomi & bisnis; dan pada tahun 2009 dari 20 sampel perusahaan, sebanyak 83,84% dari ekonomi & bisnis dan 14,49% dari non ekonomi & bisnis menduduki posisi sebagai anggota komite audit.

Tabel 4.7
Latar Belakang Pendidikan dalam Komite Audit

	latar belakang pendidikan	
	ekonomi & bisnis	non ekonomi & bisnis
Tahun 2007	87,56%	9,87%
Tahun 2008	76,03%	22,12%
Tahun 2009	83,84%	14,49%

Terlihat dalam tabel bahwa persentase latar belakang ekonomi & bisnis lebih tinggi dibanding non ekonomi bisnis. Hal ini disebabkan karena dengan memiliki pengetahuan bisnis dan ekonomi yang ada, setidaknya anggota komite memiliki kemampuan lebih baik untuk mengenai bisnis dan cara-cara mengambil keputusan bisnis daripada tidak memiliki pengetahuan bisnis dan ekonomi.

4.1.2 Penerapan *Corporate Governance*

Hasil atas penerapan Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, didapatkan bahwa pada tahun 2007, dari 21 sampel perusahaan yang diteliti, sebanyak 18 perusahaan telah membentuk komite audit sesuai peraturan tersebut; pada tahun 2008, dari 23 sampel perusahaan yang diteliti, sebanyak 19 perusahaan telah membentuk komite audit sesuai dengan

peraturan tersebut; dan pada tahun 2009, dari 26 sampel perusahaan yang diteliti, sebanyak 25 telah membentuk komite audit sesuai dengan peraturan tersebut. Jadi,

Tabel 4.8
Ketaatan Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5

	Jumlah Perusahaan
Tahun 2007	85,71% (dari 21 sampel)
Tahun 2008	82,61% (dari 23 sampel)
Tahun 2009	96,15% (dari 26 sampel)

Untuk mengetahui kecenderungan peningkatan/penurunan penerapan Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5 tentang komite audit, maka diperlukan sampel perusahaan yang memiliki data yang dibutuhkan berturut-turut dari 2007-2009. Sehingga terdapat 17 sampel perusahaan. Hasil studi yaitu Pada tahun 2007, terdapat 14 perusahaan yang membentuk komite audit sesuai dengan peraturan; pada tahun 2008, sebanyak 13 perusahaan; dan pada tahun 2009 sebanyak 16 perusahaan.

Tabel 4.9
Trend Ketaatan Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5

	Jumlah Perusahaan
Tahun 2007	82,35%
Tahun 2008	76,47%
Tahun 2009	94,12%

Terlihat dalam tabel pada tahun 2007, 2008, dan 2009, penerapan peraturan Bapepam termasuk dalam kategori tinggi, yaitu berkisar antara 71%-100%. Terjadinya penurunan dalam penerapan peraturan tersebut pada tahun 2008, tetapi selanjutnya pada tahun 2009 terjadi peningkatan, hal ini mungkin disebabkan karena perusahaan telah menyadari akan pentingnya keberadaan komite audit, terutama di sektor perbankan.

Hasil penelitian terhadap penerapan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran No. 9/12/DPNP kepada Semua Bank Umum di Indonesia, ditemukan bahwa: pada tahun 2007, dari 21 sampel perusahaan yang diteliti, sebanyak 18 perusahaan telah membentuk komite audit sesuai peraturan tersebut; pada tahun 2008, dari 24 sampel perusahaan yang diteliti, sebanyak 20

perusahaan telah membentuk komite audit sesuai dengan peraturan tersebut; dan pada tahun 2009, dari 26 sampel perusahaan yang diteliti, sebanyak 23 telah membentuk komite audit sesuai dengan peraturan tersebut.

Tabel 4.10
Persentase Ketaatan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006

	Jumlah Perusahaan
Tahun 2007	85,71% (dari 21 sampel)
Tahun 2008	83,33% (dari 24 sampel)
Tahun 2009	88,46% (dari 26 sampel)

Terlihat dalam tabel pada tahun 2007, 2008, dan 2009, penerapan peraturan Bapepam termasuk dalam kategori tinggi, yaitu berkisar antara 71%-100%. Namun masih ada perusahaan yang belum menerapkan peraturan BI tersebut, rata-rata disebabkan karena masih ada perusahaan yang belum memiliki kriteria anggota komite dari seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai, dan masih ada direksi yang menjadi anggota komite. Namun demikian, persentase jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan tersebut tergolong tinggi, hal ini mencerminkan bahwa timbulnya kesadaran perusahaan-perusahaan untuk menjalankan *Corporate Governance* sesuai dengan peraturan yang ada.

Untuk mengetahui keadaan peningkatan/penurunan terhadap penerapan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006, maka diperlukan sampel perusahaan yang memiliki data yang dibutuhkan berturut-turut dari 2007-2009. Sehingga terdapat 18 sampel perusahaan. Hasil studi yaitu Pada tahun 2007, terdapat 15 perusahaan yang membentuk komite audit sesuai dengan peraturan; pada tahun 2008, sebanyak 14 perusahaan; dan pada tahun 2009 sebanyak 15 perusahaan.

Tabel 4.11
Trend Persentase Ketaatan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006

	Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006
Tahun 2007	83,33%
Tahun 2008	77,77%
Tahun 2009	83,33%

Terlihat dalam tabel pada tahun 2007, 2008, dan 2009, penerapan peraturan Bapepam termasuk dalam kategori tinggi, yaitu berkisar antara 71%-100%. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan dalam penerapan peraturan BI No.8/14/PBI/2006. Hal ini mencerminkan bahwa timbulnya kesadaran perusahaan-perusahaan untuk menjalankan *Corporate Governance* sesuai dengan peraturan yang ada, terutama peraturan yang dikeluarkan oleh BI tentang komite. Jika dipatuhi bukan saja berdampak pada semakin efisien dewan komisaris dalam melaksanakan tugasannya karena telah dibantu oleh komite audit yang kompeten, namun juga pada akhirnya bisa meningkatkan kinerja perusahaan.

4.2 Analisis Data dan Pembahasan Komite Pemantau Risiko

4.2.1 Persebaran Komite Pemantau Risiko

Hasil dalam keberadaan komite pemantau risiko, pada tahun 2007, dari 22 sampel perusahaan, 19 perusahaan telah membentuk komite pemantau risiko di perusahaannya. Begitu juga pada tahun 2008, sebanyak 24 sampel perusahaan, 24 perusahaan tersebut telah membentuk komite pemantau risiko, dan pada tahun 2009, sebanyak 27 sampel perusahaan, 27 juga telah membentuk komite pemantau risiko.

Tabel 4.12

Jumlah Pembentukan Komite Pemantau Risiko

	Jumlah Perusahaan
Tahun 2007	86,36% (dari 22 sampel)
Tahun 2008	100% (dari 24 sampel)
Tahun 2009	100% (dari 27 sampel)

Selanjutnya dalam hal gender, pada tahun 2007 dari 18 sampel perusahaan, sebanyak 88,33% pria dan 11,67% wanita menduduki posisi sebagai anggota komite pemantau risiko. Pada tahun 2008 dari 21 sampel perusahaan, sebanyak 90,24% pria dan 9,76% wanita menduduki posisi sebagai komite pemantau risiko. Dan pada tahun 2009 dari 23 sampel perusahaan, sebanyak 92,10% pria dan 7,90% wanita menduduki posisi sebagai komite pemantau risiko.

Tabel 4.13
Gender dalam Komite Pemantau Risiko

	Gender	
	Pria	Wanita
Tahun 2007	88,33%	11,67%
Tahun 2008	90,24%	9,76%
Tahun 2009	92,10%	7,90%

Terlihat dalam tabel bahwa persentasi wanita lebih kecil dibanding pria. hal ini mungkin disebabkan karena wanita memiliki sikap kehati-hatian yang tinggi, cenderung menghindari risiko, kurang menyukai risiko dibanding pria, sehingga wanita memiliki persentasi rendah dalam beberapa jabatan daripada pria.

Untuk mengetahui kecenderungan peningkatan/penurunan jumlah wanita di dalam posisi komite pemantau risiko, maka diperlukan sampel perusahaan yang memiliki data yang dibutuhkan berturut-turut dari 2007-2009. Sehingga terdapat 14 sampel perusahaan. Hasil studi yaitu Pada tahun 2007, anggota komite terdiri dari 91,19% pria dan 8,81% wanita; pada tahun 2008, anggota komite terdiri dari 91,55% pria dan 8,45% wanita; dan pada tahun 2009, anggota komite terdiri dari 89,76% pria dan 10,24% wanita.

Tabel 4.14
Trend Gender dalam Komite Pemantau Risiko

	Gender	
	Pria	Wanita
Tahun 2007	91,19%	8,81%
Tahun 2008	91,55%	8,45%
Tahun 2009	89,76%	10,24%

Terlihat dalam tabel bahwa terjadi peningkatan persentasi wanita pada tahun 2009, hal ini meruju pada temuan riset literatur psikologis kognitif dan pemasaran yang menyebutkan bahwa wanita diduga lebih efisien dan efektif dalam memproses informasi saat adanya kompleksitas tugas dalam pengambilan keputusan dibandingkan dengan pria. Ruegger dan King (1992) menyatakan wanita umumnya memiliki tingkat pertimbangan moral yang lebih tinggi dari pada pria (Jamilah, 2007).

Selanjutnya dalam hal edukasi, pada tahun 2007 dari 9 sampel perusahaan, sebanyak 70,93% dari $\leq S1$ dan 29,07% dari $S2 \geq$ menduduki posisi sebagai anggota komite pemantau risiko. Pada tahun 2008 dari 12 sampel perusahaan, sebanyak 66,53% dari $\leq S1$ dan 33,47% dari $S2 \geq$ menduduki posisi sebagai anggota komite pemantau risiko. Dan pada tahun 2009 dari 14 sampel perusahaan, sebanyak 56,67% dari $\leq S1$ dan 43,33% dari $S2 \geq$ menduduki posisi sebagai anggota komite pemantau risiko.

Tabel 4.15
Tingkat Edukasi dalam Komite Pemantau Risiko

	Tingkat Edukasi	
	$\leq S1$	$S2 \geq$
Tahun 2007	70,93%	29,07%
Tahun 2008	66,53%	33,47%
Tahun 2009	56,67%	43,33%

Terlihat dalam tabel bahwa tingkat $S2 \geq$ lebih kecil dibandingkan $S1 \leq$, hal ini mungkin disebabkan karena masih jumlah $S2 \geq$ di Inonesia masih kurang banyak. Selain itu Kusumastuti (2005) dalam Nurudin (2004) menyebutkan bahwa penelitian dari Harvard University di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa kesuksesan tidak semata-mata ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan teknis (hard skill), tetapi oleh keterampilan mengelola diri dan orang lain (soft skill). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% dengan hard skill dan sisanya 80% dengan soft skill. Pemahaman dari istilah hard skill adalah skill yang dapat menghasilkan sesuatu sifatnya visible dan immediate. Tidak seperti hard skill, soft skill bersifat invisible dan tidak segera. Soft skill meliputi interaksi dengan kehidupan orang lain. Contoh soft skill antara lain: kemampuan beradaptasi, komunikasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, conflict resolution.

Untuk mengetahui kecenderungan peningkatan/penurunan jumlah $S2 \geq$ di dalam posisi komite pemantau risiko, maka diperlukan sampel perusahaan yang memiliki data yang dibutuhkan berturut-turut dari 2007-2009. Sehingga terdapat 6 sampel perusahaan. Hasil studi yaitu Pada tahun 2007, anggota komite terdiri dari 79,17% $\leq S1$ dan 20,83% $\geq S2$; pada tahun 2008, anggota komite terdiri dari 79,17%

$\leq S1$ dan 20,83% $S2\geq$; dan pada tahun 2009, anggota komite terdiri dari 75% $\leq S1$ dan 25% $S2\geq$.

Tabel 4.16
Tend Tingkat Edukasi dalam Komite Pemantau Risiko

	Tingkat Edukasi	
	$\leq S1$	$S2\geq$
Tahun 2007	79,17%	20,83%
Tahun 2008	79,17%	20,83%
Tahun 2009	75%	25%

Terlihat dalam tabel bahwa terjadinya peningkatan dalam $S2\geq$ pada tahun 2009, hal ini merujuk pada kutipan Santrock (1995) dalam Kusumastuti (2005) menyatakan bahwa pendidikan universitas membantu seseorang dalam kemajuan karirnya, di mana seseorang berpendidikan tinggi akan memiliki jenjang karir lebih tinggi dan lebih cepat.

Selanjutnya hasil studi dari kategori tingkat usia yang menduduki posisi sebagai anggota komite pemantau risiko, yaitu: pada tahun 2007 dari 10 sampel perusahaan, sebanyak 3,33% dari ≤ 40 dan 96,67% dari $40\geq$; pada tahun 2008 dari 15 sampel perusahaan, sebanyak 3,56% berasal dari ≤ 40 dan 98,15% dari $40\geq$; dan pada tahun 2009 dari 17 sampel perusahaan, sebanyak 4,90% dari ≤ 40 dan 95,1% dari $40\geq$ menduduki posisi sebagai anggota komite pemantau risiko.

Tabel 4.17
Tingkat Usia dalam Komite Pemantau Risiko

	tingkat usia	
	≤ 40	$40\geq$
Tahun 2007	3,33%	96,67%
Tahun 2008	3,56%	96,44%
Tahun 2009	4,90%	95,1%

Terlihat dalam tabel bahwa persentase tingkat usia $40\geq$ lebih tinggi dibanding $40\leq$, hal ini disebabkan karena faktor-faktor yaitu pada usia $40\geq$ merupakan masa ketika orang mencapai dan mempertahankan kepuasan dalam karirnya, mereka cenderung fokus terhadap pekerjaan daripada berpindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. usia anggota dewan berkaitan dengan kebijaksanaan yang

dimiliki. Semakin bertambah usia, semakin bijaksana seseorang. Selain itu, para pekerja yang lebih tua biasanya memperlihatkan lebih banyak kesetiaan kepada perusahaan daripada pekerja yang masih muda (kusumastuti, 2005).

Selanjutnya hasil studi dari kategori tingkat latar belakang pendidikan yang menduduki posisi sebagai anggota komite pemantau risiko, yaitu: pada tahun 2007 dari 10 sampel perusahaan, sebanyak 89,67% dari ekonomi & bisnis dan 10,33% dari non ekonomi & bisnis; pada tahun 2008 dari 15 sampel perusahaan, sebanyak 83,34% berasal dari ekonomi & bisnis dan 15,33% dari non ekonomi & bisnis; dan pada tahun 2009 dari 17 sampel perusahaan, sebanyak 90,1% dari ekonomi & bisnis dan 8,73% dari non ekonomi & bisnis menduduki posisi sebagai anggota komite pemantau risiko.

Tabel 4.18

Latar Belakang Pendidikan dalam Komite Pemantau Risiko

	latar belakang pendidikan	
	ekonomi & bisnis	non ekonomi & bisnis
Tahun 2007	89,67%	10,33%
Tahun 2008	83,34%	15,33%
Tahun 2009	90,1%	8,73%

Terlihat dalam tabel bahwa persentase latar belakang ekonomi & bisnis lebih tinggi dibanding non ekonomi bisnis. Hal ini disebabkan karena dengan memiliki pengetahuan bisnis dan ekonomi yang ada, setidaknya anggota komite memiliki kemampuan lebih baik untuk mengenai bisnis dan cara-cara mengambil keputusan bisnis daripada tidak memiliki pengetahuan bisnis dan ekonomi.

4.1.2 Penerapan *Corporate Governance*

Hasil penelitian terhadap penerapan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran No. 9/12/DPNP kepada Semua Bank Umum di Indonesia, ditemukan bahwa: pada tahun 2007, dari 18 sampel perusahaan yang diteliti, sebanyak 11 perusahaan telah membentuk komite pemantau resiko sesuai peraturan tersebut; pada tahun 2008, dari 20 sampel perusahaan yang diteliti, sebanyak 12 perusahaan telah membentuk komite pemantau resiko sesuai dengan

peraturan tersebut; dan pada tahun 2009, dari 23 sampel perusahaan yang diteliti, sebanyak 17 telah membentuk komite pemantau resiko sesuai dengan peraturan tersebut.

Tabel 4.19
Penerapan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006

	Jumlah Perusahaan
Tahun 2007	55%
Tahun 2008	60%
Tahun 2009	73,91%

Terlihat dalam tabel pada tahun 2007 dan 2008, penerapan peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 termasuk dalam kategori sedang, yaitu berkisar antara 41%-70%, dan pada tahun 2009 termasuk dalam kategori tinggi, yaitu berkisar antara 71%-100%. Masih ada perusahaan yang belum menerapkan peraturan BI tersebut, rata-rata disebabkan karena masih ada perusahaan yang belum memiliki kriteria anggota komite dari seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai, dan masih ada direksi yang menjadi anggota komite. Namun demikian, persentase jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan tersebut tergolong tinggi, hal ini mencerminkan bahwa timbulnya kesadaran perusahaan-perusahaan untuk menjalankan *Corporate Governance* sesuai dengan peraturan yang ada.

Untuk mengetahui keadaan peningkatan/penurunan terhadap penerapan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006, maka diperlukan sampel perusahaan yang memiliki data yang dibutuhkan berturut-turut dari 2007-2009. Sehingga terdapat 14 sampel perusahaan. Hasil studi yaitu Pada tahun 2007, terdapat 8 perusahaan yang membentuk komite pemantau resiko sesuai dengan peraturan; pada tahun 2008, sebanyak 8 perusahaan; dan pada tahun 2009 sebanyak 11 perusahaan.

Tabel 4.20
Trend Penerapan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006

	Jumlah Perusahaan
Tahun 2007	57,14%
Tahun 2008	57,14%
Tahun 2009	78,57%

Terihat dalam tabel pada tahun 2007 dan 2008, penerapan peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 termasuk dalam kategori sedang, yaitu berkisar antara 41%-70%, dan pada tahun 2009 termasuk dalam kategori tinggi, yaitu berkisar antara 71%-100%. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan dalam penerapan peraturan BI No.8/14/PBI/2006. Hal ini mencerminkan bahwa timbulnya kesadaran perusahaan-perusahaan untuk menjalankan *Corporate Governance* sesuai dengan peraturan yang ada, terutama peraturan yang dikeluarkan oleh BI tentang komite. Jika dipatuhi bukan saja berdampak pada semakin efisien dewan komisaris dalam melaksanakan tugasannya karena telah dibantu oleh komite pemantau risiko yang kompeten, namun juga pada akhirnya bisa meningkatkan kinerja perusahaan.

4.3 Analisis Data dan Pembahasan Komite Nominasi dan Remunerasi

4.1.1 Persebaran Komite Nominasi dan Remunerasi

Hasil dalam keberadaan komite Nominasi dan Remunerasi, pada tahun 2007, dari 22 sampel perusahaan, 21 perusahaan telah membentuk komite Nominasi dan Remunerasi di perusahaannya. Begitu juga pada tahun 2008, sebanyak 24 sampel perusahaan, 24 perusahaan tersebut telah membentuk komite Nominasi dan Remunerasi, dan pada tahun 2009, sebanyak 27 sampel perusahaan, 27 perusahaan telah membentuk komite Nominasi dan Remunerasi.

Tabel 4.21

Jumlah Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi

	Jumlah Perusahaan
Tahun 2007	95,45% (dari 22 sampel)
Tahun 2008	100% (dari 24 sampel)
Tahun 2009	100% (dari 27 sampel)

Selanjutnya dalam hal gender, pada tahun 2007 dari 18 sampel perusahaan, sebanyak 76,71% pria dan 23,29% wanita menduduki posisi sebagai anggota komite Nominasi dan Remunerasi. Pada tahun 2008 dari 22 sampel perusahaan, sebanyak 76,82% pria dan 23,18% wanita menduduki posisi sebagai komite Nominasi dan Remunerasi. Dan pada tahun 2009 dari 24 sampel perusahaan, sebanyak 83,47% pria dan 16,53% wanita menduduki posisi sebagai komite Nominasi dan Remunerasi.

Tabel 4.22
Gender dalam Komite Nominasi dan Remunerasi

	Gender	
	Pria	Wanita
Tahun 2007	76,71%	23,29%
Tahun 2008	76,82%	23,18%
Tahun 2009	83,47%	16,53%

Terlihat dalam tabel bahwa jumlah wanita lebih kecil dibanding pria. Hal ini mungkin karena faktor pria lebih mandiri, berorientasi ke masa depan. Merujuk pada kutipan bahwa masih sedikitnya wanita yang ditempatkan di posisi puncak mungkin disebabkan oleh adanya pandangan yang berbeda tentang penyebab kesuksesan yang diraih pria dan wanita. Kesuksesan pria dianggap karena kemampuan yang tinggi (dalam hal talenta atau kecerdasan), sedangkan kesuksesan wanita dianggap lebih disebabkan oleh faktor keberuntungan (Deaux dan Ernswiller dalam kusumastuti, 2007).

Untuk mengetahui kecenderungan peningkatan/penurunan jumlah wanita di dalam posisi komite Nominasi dan Remunerasi, maka diperlukan sampel perusahaan yang memiliki data yang dibutuhkan berturut-turut dari 2007-2009. Sehingga terdapat 13 sampel perusahaan. Hasil studi yaitu Pada tahun 2007, anggota komite terdiri dari 80,58% pria dan 19,42% wanita; pada tahun 2008, anggota komite terdiri dari 76,79% pria dan 23,21% wanita; dan pada tahun 2009, anggota komite terdiri dari 83,85% pria dan 16,15% wanita.

Tabel 4.23
Trend Gender dalam Komite Nominasi dan Remunerasi

	Gender	
	Pria	Wanita
Tahun 2007	80,58%	19,42%
Tahun 2008	76,79%	23,21%
Tahun 2009	83,85%	16,15%

Terlihat dalam tabel bahwa persentase wanita dalam komite audit lebih kecil dibanding pria. Merujuk pada Data statistik Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi menunjukkan bahwa jumlah penduduk wanita yang bekerja tahun 2005 dalam jenis pekerjaan tenaga kepemimpinan adalah sebanyak 37.801 jiwa (13%) dari

total 290.464 penduduk yang bekerja sebagai tenaga kepemimpinan (<http://www.nakertrans.go.id>). hal ini mungkin disebabkan karena faktor wanita memiliki sikap kehati-hatian yang tinggi, cenderung menghindari risiko, kurang menyukai risiko dibanding pria, sehingga wanita memiliki persentasi rendah dalam beberapa jabatan daripada pria.

Selanjutnya dalam hal edukasi, pada tahun 2007 dari 10 sampel perusahaan, sebanyak 59,58% dari $\leq S1$ dan 40,42% dari $S2 \geq$ menduduki posisi sebagai anggota komite Nominasi dan Remunerasi. Pada tahun 2008 dari 12 sampel perusahaan, sebanyak 58,90% dari $\leq S1$ dan 41,11% dari $S2 \geq$ menduduki posisi sebagai anggota komite Nominasi dan Remunerasi. Dan pada tahun 2009 dari 15 sampel perusahaan, sebanyak 58,11% dari $\leq S1$ dan 41,89% dari $S2 \geq$ menduduki posisi sebagai anggota komite Nominasi dan Remunerasi.

Tabel 4.24
Tingkat Edukasi dalam Komite Nominasi dan Remunerasi

	Tingkat Edukasi	
	$\leq S1$	$S2 \geq$
Tahun 2007	59,58%	40,42%
Tahun 2008	58,90%	41,11%
Tahun 2009	58,11%	41,89%

Terlihat dalam tabel bahwa tingkat $S2 \geq$ lebih kecil dibandingkan $S1 \leq$, hal ini mungkin disebabkan karena masih jumlah $S2 \geq$ di Inonesia masih kurang banyak. Selain itu Kusumastuti (2005) dalam Nurudin (2004) menyebutkan bahwa penelitian dari Harvard University di Amerika Serikat mengungkapkan bahwa kesuksesan tidak semata-mata ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan teknis (*hard skill*), tetapi oleh keterampilan mengelola diri dan orang lain (*soft skill*). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% dengan *hard skill* dan sisanya 80% dengan *soft skill*. Pemahaman dari istilah *hard skill* adalah skill yang dapat menghasilkan sesuatu sifatnya *visible* dan *immediate*. Tidak seperti *hard skill*, *soft skill* bersifat *invisible* dan tidak segera. *Soft skill* meliputi interaksi dengan kehidupan orang lain. Contoh *soft skill* antara lain: kemampuan beradaptasi, komunikasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, *conflict resolution*.

Untuk mengetahui kecenderungan peningkatan/penurunan jumlah $S2 \geq$ di dalam posisi komite Nominasi dan Remunerasi, maka diperlukan sampel perusahaan yang memiliki data yang dibutuhkan berturut-turut dari 2007-2009. Sehingga terdapat 7 sampel perusahaan. Hasil studi yaitu Pada tahun 2007, anggota komite terdiri dari 55,36% $\leq S1$ dan 44,64% $\geq S2$; pada tahun 2008, anggota komite terdiri dari 57,38% $\leq S1$ dan 42,61% $\geq S2$; dan pada tahun 2009, anggota komite terdiri dari 58,33% $\leq S1$ dan 41,66% $\geq S2$.

Tabel 4.25
Trend Tingkat Edukasi dalam Komite Nominasi dan Remunerasi

	Tingkat Edukasi	
	$\leq S1$	$\geq S2$
Tahun 2007	55,36%	44,64%
Tahun 2008	57,38%	42,61%
Tahun 2009	58,33%	41,66%

Terlihat dalam tabel bahwa jumlah $S2 \geq$ yang menduduki posisi komite audit pada tahun 2008 menurun, hal ini mungkin disebabkan karena bahwa kesuksesan tidak semata-mata ditentukan oleh pengetahuan dan keterampilan teknis (*hard skill*), tetapi oleh keterampilan mengelola diri dan orang lain (*soft skill*). Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% dengan *hard skill* dan sisanya 80% dengan *soft skill*. Walau tingkat edukasi $\leq S1$, namun untuk meningkatkan kemampuannya juga sering ikut dalam seminar-seminar, workshop-workshop, dan pelatihan-pelatihan. Selain itu, rata-rata anggota komite juga telah memiliki pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman. Dimana pengetahuan akan memberikan kontribusi yang baik jika didukung dengan pengalaman yang memadai.

Selanjutnya hasil studi dari kategori tingkat usia yang menduduki posisi sebagai anggota komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu: pada tahun 2007 dari 10 sampel perusahaan, sebanyak 11,67% dari ≤ 40 dan 94,87% dari $40 \geq$; pada tahun 2008 dari 13 sampel perusahaan, sebanyak 5,13% berasal dari ≤ 40 dan 98,15% dari $40 \geq$; dan pada tahun 2009 dari 16 sampel perusahaan, sebanyak 9,37% dari ≤ 40 dan 90,63% dari $40 \geq$ menduduki posisi sebagai anggota komite Nominasi dan Remunerasi.

Tabel 4.26
Tingkat Usia dalam Komite Nominasi dan Remunerasi

	tingkat usia	
	≤ 40	$40 \geq$
Tahun 2007	11,67%	88,33%
Tahun 2008	5,13%	94,87%
Tahun 2009	9,37%	90,63%

Terlihat dalam tabel bahwa persentase tingkat usia $40 \geq$ lebih tinggi dibanding $40 \leq$, hal ini disebabkan karena faktor-faktor yaitu pada usia $40 \geq$ merupakan masa ketika orang mencapai dan mempertahankan kepuasan dalam karirnya, mereka cenderung fokus terhadap pekerjaan daripada berpindah-pindah dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain. usia anggota dewan berkaitan dengan kebijaksanaan yang dimiliki. Semakin bertambah usia, semakin bijaksana seseorang. Selain itu, para pekerja yang lebih tua biasanya memperlihatkan lebih banyak kesetiaan kepada perusahaan daripada pekerja yang masih muda (kusumastuti, 2005).

Selanjutnya hasil studi dari kategori tingkat latar belakang pendidikan yang menduduki posisi sebagai anggota komite Nominasi dan Remunerasi, yaitu: pada tahun 2007 dari 13 sampel perusahaan, sebanyak 79,57% dari ekonomi & bisnis dan 18,42% dari non ekonomi & bisnis; pada tahun 2008 dari 18 sampel perusahaan, sebanyak 61,54% berasal dari ekonomi & bisnis dan 36,92% dari non ekonomi & bisnis; dan pada tahun 2009 dari 20 sampel perusahaan, sebanyak 72,60% dari ekonomi & bisnis dan 26,15% dari non ekonomi & bisnis menduduki posisi sebagai anggota komite Nominasi dan Remunerasi.

Tabel 4.27
Latar Belakang Pendidikan dalam Komite Nominasi dan Remunerasi

	latar belakang pendidikan	
	ekonomi & bisnis	non ekonomi & bisnis
Tahun 2007	79,57%	18,42%
Tahun 2008	61,54%	36,92%
Tahun 2009	72,60%	26,15%

Terlihat dalam tabel bahwa persentase latar belakang ekonomi & bisnis lebih tinggi dibanding non ekonomi bisnis. Hal ini disebabkan karena dengan memiliki pengetahuan bisnis dan ekonomi yang ada, setidaknya anggota komite memiliki

kemampuan lebih baik untuk mengenai bisnis dan cara-cara mengambil keputusan bisnis daripada tidak memiliki pengetahuan bisnis dan ekonomi.

4.1.2 Penerapan *Corporate Governance*

Hasil studi terhadap penerapan Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 dan Surat Edaran No. 9/12/DPNP kepada Semua Bank Umum di Indonesia, ditemukan bahwa: pada tahun 2007, dari 21 sampel perusahaan yang diteliti, sebanyak 17 perusahaan telah membentuk komite Nominasi dan Remunerasi sesuai peraturan tersebut; pada tahun 2008, dari 23 sampel perusahaan yang diteliti, sebanyak 22 perusahaan telah membentuk komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan peraturan tersebut; dan pada tahun 2009, dari 26 sampel perusahaan yang diteliti, sebanyak 24 telah membentuk komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan peraturan tersebut.

Tabel 4.28

Penerapan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006

	Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006
Tahun 2007	80,95%
Tahun 2008	95,65%
Tahun 2009	92,31%

Terlihat dalam tabel pada tahun 2007, 2008, dan 2009 penerapan peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 termasuk dalam kategori tinggi, yaitu berkisar antara 71%-100%. Namun masih ada perusahaan yang belum menerapkan peraturan BI tersebut, rata-rata disebabkan karena masih ada perusahaan yang belum memiliki kriteria anggota komite dari seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai, dan masih ada direksi yang menjadi anggota komite. Namun demikian, persentase jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan tersebut tergolong tinggi, hal ini mencerminkan bahwa timbulnya kesadaran perusahaan-perusahaan untuk menjalankan *Corporate Governance* sesuai dengan peraturan yang ada.

Untuk mengetahui keadaan peningkatan/penurunan terhadap penerapan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006, maka diperlukan sampel perusahaan yang memiliki data yang dibutuhkan berturut-turut dari 2007-2009. Sehingga terdapat 17 sampel perusahaan. Hasil studi yaitu Pada tahun 2007, terdapat 16 perusahaan yang membentuk komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan peraturan; pada tahun 2008, sebanyak 16 perusahaan; dan pada tahun 2009 sebanyak 17 perusahaan.

Tabel 4.29

Trend Penerapan Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006

	Peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006
Tahun 2007	94,12%
Tahun 2008	94,12%
Tahun 2009	100%

Terihat dalam tabel pada tahun 2007, 2008, dan 2009 penerapan peraturan Bank Indonesia No.8/14/PBI/2006 termasuk dalam kategori tinggi, yaitu berkisar antara 71%-100%. Pada tahun 2009 terjadi peningkatan dalam penerapan peraturan BI. Hal ini mencerminkan bahwa timbulnya kesadaran perusahaan-perusahaan untuk menjalankan *Corporate Governance* sesuai dengan peraturan yang ada, terutama peraturan yang dikeluarkan oleh BI tentang komite. Jika dipatuhi bukan saja berdampak pada semakin efisien dewan komisaris dalam melaksanakan tugasannya karena telah dibantu oleh komite nominasi dan remunerasi yang kompeten, namun juga pada akhirnya bisa meningkatkan kinerja perusahaan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Persebaran Komite Dewan komisaris
 - a. Hasil studi menemukan bahwa perusahaan telah membentuk komite audit, komite pemantau risiko, komite nominasi, dan komite remunerasi.
 - b. Hasil studi menemukan bahwa pria lebih mendominasi dibanding pria.
 - c. Hasil studi menemukan bahwa $\leq S1$ lebih banyak dibanding $S2 \geq$.
 - c. Hasil studi menemukan bahwa usia $40 \geq$ lebih banyak dibanding ≤ 40 .
 - d. Hasil studi menemukan bahwa latar belakang pendidikan ekonomi & bisnis lebih banyak dibanding non ekonomi dan bisnis.
2. keberadaan komite-komite Dewan Komisaris pada Industri Perbankan terhadap penerapan peraturan di Indonesia, telah dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan, namun masih ada beberapa perusahaan yang belum melaksanakannya, terutama dalam pembentukan komite pemantau risiko.

5.2 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini hanya menggunakan sampel *annual report* yang berasal dari Bursa Efek Indonesia dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, karena keterbatasan waktu dan data tersebut peneliti hanya mendapatkan 71 bank (per tahun) yang memiliki data yang lengkap.

2. Penelitian ini bersifat studi terhadap komite-komite fungsional pada perbankan. Namun, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas sampel, seperti perusahaan manufaktur.

5.3 Implikasi

Untuk mengembangkan penelitian ini penelitian selanjutnya mungkin dapat menambahkan variabel yang lain, seperti keberadaan minoritas, kewarganegaraan dari komite audit, komite pemantau risiko, komite nominasi dan komite remunerasi. Selain itu, juga bisa menghubungkan persebaran dan peraturan Corporate governance sebagai variable dependent dengan *profitability* dan ukuran kinerja perusahaan yang merupakan indikator keuangan yang dijadikan sebagai variabel.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anggarini, Tifani Vota. (2010). *Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Financial Distress (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*
<http://eprints.undip.ac.id/22544/1/Skripsi.pdf>
(diakses tanggal 12 Oktober 2010)
- Arifin. (2005). *Peran Akuntan dalam Menegakkan Prinsip Good Corporate Governance pada Perusahaan di Indonesia (Tinjauan Perspektif Teori Keagenan)*
<http://eprints.undip.ac.id/333/1/Arifin.pdf>
(diakses tanggal 11 Agustus 2010)
- Forum For Corporate Governance in Indonesia. 2009. Retrieved August 15, 2010.
From <http://www.fcgi.or.id>
- Hanafi, Achmad. (2010). *Good Corporate Governance*.
http://achmad-hanafi.blogspot.com/2010/11/good-corporate-governance-gcg_15.html
(diakses tanggal 20 November 2010)
- Indonesian Capital Market Directory. 2006.
- Indonesian Capital Market Directory. 2007.
- Indonesian Capital Market Directory. 2008.
- Indonesian Capital Market Directory. 2009.
- Indonesian's Code of Good Corporate Governance. 2006. Indonesia.
- Kemalasari, Endang. (2009). *Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*.
<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/4043/1/09E01876.pdf>

(diakses tanggal 2 oktober 2010)

KNKCG. 2002. *Good Corporate Governance*. Jakarta.

Kusumastuti, Sari, Supatmi, dan Perdana Sastra. (2005). *Pengaruh Board Diversity Terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif Corporate Governance*.

<http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting>

(diakses tanggal 12 agustus 2010)

Maksum, Azhar. (2005). *Tinjauan atas Good Corporate governance di Indonesia*.

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/744/1/08E00104.pdf>

(diakses tanggal 2 oktober 2010)

Rustiana, Siti Hamidah. (2004). *Pengaruh Strategi dan Budaya Perusahaan terhadap Kinerja Manajer di PT Kimia Farma Apotek: GCG Sebagai Variabel Intervening*. Tesis. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara. Medan.

Pedoman *Corporate Governance* Perbankan Indonesia tahun 2004.

<http://www.governanceindonesia.com/donlot/Pedoman%20GCG%20Perbankan.pdf>

(diakses tanggal 14 September 2010)

Pedoman tentang Komisaris Independen. 2004.

<http://www.governance-indonesia.com/donlot/komind.pdf>

(diakses tanggal 14 September 2010)

Pedoman Umum Corporate Governance 2006.

http://www.ecgi.org/codes/documents/indonesia_cg_2006_id.pdf

(diakses tanggal 13 September 2010)

Peraturan Bank Indonesia No 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank <http://www.bi.go.id/biweb/utama/peraturan/PBI%203222001.PDF>

(diakses tanggal 12 Juni 2010)

Peraturan Bank Indonesia No 8/4/2006 tentang Pelaksanaan *Corporate Governance* bagi Bank Umum

<http://legalitas.org/incl-php/buka.php?d=2000+6&f=pbi8-4-2006pjl.htm>
(diakses tanggal 12 Juni 2010)

Peraturan Bank Indonesia (PBI) No 8/14/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Corporate Governance* bagi Bank Umum

http://www.iicg.org/asset/doc/pbi_81407.pdf

(diakses tanggal 12 Juni 2010)

Peraturan Bapepam No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.

<http://www.bapepam.go.id/old/old/hukum/peraturan/emiten/VIII.G7.PDF>

(diakses tanggal 12 Juni 2010)

Peraturan Bapepam-LK No: KEP-134/BL/2006 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Tahunan bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

<http://www.bapepam.go.id/old/hukum/peraturan/X/X.K.6.pdf> (diakses tanggal 12 Juni 2010)

Sam'ani. (2008). *Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage terhadap Kinerja keuangan pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2004-2007.*

<http://eprints.undip.ac.id/18615/1/Sam%E2%80%99ani.pdf>

(diakses tanggal 11 Agustus 2010)

Sari, Irmala. (2010). *Pengaruh mekanisme Good Corporate Governance terhadap Kinerja Perbankan Nasional.*

<http://eprints.undip.ac.id/>

(diakses tanggal 11 Oktober 2010)

Sunarto. (2003). *Corporate Governance dan Kinerja Saham.* Fokus Ekonomi. Volume 2, No. 3: 240-257.

Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tahun 2007

<http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/E7BC06FE-B41B-4BED-B93D-E3A7D9746625/12137/SENo912DPNP.pdf>

(diakses tanggal 3 Juli 2010)

Surat Edaran Ketua Bapepam No: SE-02/PM/2002.

http://www.russellbedford.co.id/downloads/resources/7cb53_StdLapKeu_Investasi.pdf

(diakses tanggal 12 Juni 2010)

Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tentang penerapan praktik *Corporate Governance* pada BUMN

http://pkbl.bumn.go.id/file/SK_117_tahun_2002%20penerapan%20praktek%20Good%20Corporate%20Governance%20pada%20BUMN.pdf

(diakses tanggal 16 Juni 2010)

Suryani, Indra Dewi. (2010). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI*.

http://eprints.undip.ac.id/22932/1/FULL_TEXT.pdf

(diakses tanggal 3 September 2010)

Tim Studi Pengkajian Penerapan Prinsip-Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam mengenai Corporate Governance. (2006). *Studi Penerapan Prinsip – Prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam mengenai Corporate Governance*.

http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/kajian_pm/studi-2006/Studi-Penerapan-OECD.pdf

(diakses tanggal 12 Agustus 2010)

Tristiani, Nila. (2005). *Pengaruh Penerapan Corporate Governance Terhadap Abnormal Return pada saat Pengumuman Laporan Keuangan 2003*.
<http://eprints.undip.ac.id/10219/1/2005MAK3660.pdf>
(diakses tanggal 3 Oktober 2010)

Undang-undang Republik Indonesia. 2007. UU RI No.40 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

http://www.bapepam.go.id/reksadana/files/regulasi/UU_No_8_Tahun_1995_Pasar_Modal.pdf

(diakses tanggal 12 Agustus 2010)

Undang-undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/uu-bank-10-1998.pdf>

(diakses tanggal 12 Agustus 2010)

KEBERADAAN KOMITE AUDIT

Bank	2007
Bank Artha Graha Internasional Tbk	1
Bank Bumi Arta Tbk	1
Bumiputera Indonesia Tbk	1
Bank Central Asia Tbk	1
Bank Mutiara Tbk	1
Bank Danamon Tbk	1
Bank Eksekutif Internasional Tbk	1
Bank Kesawan Tbk	1
Bank Mandiri (Persero) Tbk	1
Bank Mayapada Tbk	1
Bank Mega Tbk	1
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1
Bank CIMB Niaga Tbk	1
Bank OCBC NISP Tbk	1
Bank Nusantara Parahyangan Tbk	1
Bank Permata Tbk	1
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1
Bank Victoria International Tbk	1
Bank Agroniaga Tbk	1
Bank Windu Kentjana International Tbk	1
Bank Ekonomi Raharja Tbk	1

Bank	2008
Bank Artha Graha Internasional Tbk	1
Bank Bukopin Tbk	1
Bank Bumi Arta Tbk	1
Bumiputera Indonesia Tbk	1
Bank Mutiara Tbk	1
Bank Danamon Tbk	1
Bank Eksekutif Internasional Tbk	1
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	1
Bank Internasional Indonesia Tbk	1
Bank Kesawan Tbk	1
Bank Mandiri (Persero) Tbk	1
Bank Mayapada Tbk	1
Bank Mega Tbk	1
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1
Bank CIMB Niaga Tbk	1
Bank OCBC NISP Tbk	1
Bank Pan Indonesia Tbk	1
Bank Permata Tbk	1
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1
Bank Swadesi Tbk	1
Bank Victoria International Tbk	1
Bank Capital Indonesia Tbk	1
Bank Windu Kentjana International Tbk	1
Bank Ekonomi Raharja Tbk	1

Bank	2009
Bank Artha Graha Internasional Tbk	1
Bank Bukopin Tbk	1
Bank Bumi Arta Tbk	1
Bumiputera Indonesia Tbk	1
Bank Central Asia Tbk	1
Bank Mutiara Tbk	1
Bank Danamon Tbk	1
Bank Eksekutif Internasional Tbk	1
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	1
Bank Internasional Indonesia Tbk	1
Bank Kesawan Tbk	1
Bank Mandiri (Persero) Tbk	1
Bank Mayapada Tbk	1
Bank Mega Tbk	1
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1
Bank CIMB Niaga Tbk	1
Bank Nusantara Parahyangan Tbk	1
Bank Pan Indonesia Tbk	1
Bank Permata Tbk	1
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1
Bank Swadesi Tbk	1
Bank Victoria International Tbk	1
Bank Agroniaga Tbk	1
Bank Capital Indonesia Tbk	1
Bank Windu Kentjana International Tbk	1
Bank Ekonomi Raharja Tbk	1
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	1

GENDER ANGGOTA KOMITE AUDIT -2007

	%	
	Pria	Wanita
Bank Artha Graha Internasional Tbk	100%	
Bank Bumi Arta Tbk	100%	
Bumiputera Indonesia Tbk	100%	
Bank Central Asia Tbk	100%	
Bank Mutiara Tbk	100%	
Bank Danamon Tbk	100%	
Bank Eksekutif Internasional Tbk	100%	
Bank Mandiri Tbk	80%	20%
Bank Mega Tbk	100%	
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	100%	
Bank CIMB Niaga Tbk	100%	
Bank OCBC NISP Tbk	100%	
Bank Nusantara Parahyangan Tbk	33,33%	66,67%
Bank Permata Tbk	66,67%	33,33%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	80%	20%
Bank Victoria International Tbk	33,33%	66,67%
Bank Agroniaga Tbk	66,67%	33,33%
Bank Windu Kentjana International Tbk	100%	
Bank Ekonomi Raharja Tbk	100%	
19 perusahaan/total	<u>1660%</u> 19	<u>240%</u> 19
Rata-rata:	87,37%	12,63%

GENDER ANGGOTA KOMITE AUDIT-2008

	%	
	Pria	Wanita
Bank Artha Graha Internasional Tbk	100%	
Bank Bukopin Tbk	100%	
Bank Bumi Arta Tbk	100%	
Bumiputera Indonesia Tbk	100%	
Bank Central Asia Tbk	100%	
Bank Mutiara Tbk	100%	
Bank Danamon Tbk	100%	
Bank Eksekutif Int Tbk	100%	
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	50%	50%
Bank Internasional Indonesia Tbk	100%	
Bank Kesawan Tbk	100%	
Bank Mandiri (Persero) Tbk	85,71%	14,29%
Bank Mega Tbk		
Bank Negara Indonesia Tbk	100%	
Bank CIMB Niaga Tbk	100%	
Bank OCBC NISP Tbk	100%	
Bank Permata Tbk	100%	
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	80%	20%
Bank Swadesi Tbk	75%	25%
Bank Victoria International Tbk	33,33%	66,67%
Bank Capital Indonesia Tbk	66,67%	33,33%
Bank Windu Kentjana International Tbk	100%	
Bank Ekonomi Raharja Tbk	75%	25%
23 perusahaan/total	<u>1965,71%</u> 23	<u>234,29%</u> 23
Rata-rata:	85,47%	10,19%

GENDER ANGGOTA KOMITE AUDIT-2009

	%	
	Pria	Wanita
Bank Artha Graha Internasional Tbk	100%	
Bank Bukopin Tbk	100%	
Bank Bumi Arta Tbk	100%	
Bumiputera Indonesia Tbk	100%	
Bank Central Asia Tbk	100%	
Bank Mutiara Tbk	100%	
Bank Danamon Tbk	100%	
Bank Eksekutif Internasional Tbk	100%	
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	100%	
Bank Internasional Indonesia Tbk	100%	
Bank Kesawan Tbk	100%	
Bank Mandiri (Persero) Tbk	75%	25%
Bank Mega Tbk	100%	
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	100%	
Bank CIMB Niaga Tbk	100%	
Bank Nusantara Parahyangan Tbk	100%	
Bank Permata Tbk	100%	
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	80%	20%
Bank Swadesi Tbk	75%	25%
Bank Victoria International Tbk	33,33%	66,67%
Bank Agroniaga Tbk	100%	
Bank Capital Indonesia Tbk	100%	
Bank Windu Kentjana Int Tbk	100%	
Bank Ekonomi Raharja Tbk	75%	25%
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	100%	
25 perusahaan	<u>2338,33%</u> 25	<u>161,67%</u> 25
Rata-rata:	93,53%	6,47%

TREND GENDER ANGGOTA KOMITE AUDIT 2007-2009

	2007		2008		2009	
	Pria(%)	Wanita(%)	Pria(%)	Wanita(%)	Pria(%)	Wanita(%)
Bank Artha Graha Internasional Tbk	100%		100%		100%	
Bank Bumi Arta Tbk	100%		100%		100%	
Bumiputera Indonesia Tbk	100%		100%		100%	
Bank Central Asia Tbk	100%		100%		100%	
Bank Mutiara Tbk	100%		100%		100%	
Bank Danamon Tbk	100%		100%		100%	
Bank Eksekutif Internasional Tbk	100%		100%		100%	
Bank Mandiri (Persero) Tbk	80%	20%	75%	25%	75%	25%
Bank Mega Tbk	100%		100%		100%	
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	100%		100%		100%	
Bank CIMB Niaga Tbk	100%		100%		100%	
Bank Permata Tbk	66,67%	33,33%	100%		100%	
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	80%	20%	80%	20%	80%	20%
Bank Victoria International Tbk	33,33%	66,67%	33,33%	66,67%	33,33%	66,67%
Bank Windu Kentjana International Tbk	100%		100%		100%	
Bank Ekonomi Raharja Tbk	100%		75%	25%	75%	25%
6 perusahaan/total	<u>1460%</u> 16	<u>140%</u> 16	<u>1463,33%</u> 16	<u>136,67%</u> 16	<u>1463,33%</u> 16	<u>136,67%</u> 16
rata-rata:	91,25%	8,75%	91,46%	8,54%	91,46%	8,54%

TREND GENDER ANGGOTA KOMITE AUDIT 2007-2009

	2007		2008		2009	
	Pria(%)	Wanita(%)	Pria(%)	Wanita(%)	Pria(%)	Wanita(%)
Bank Artha Graha Internasional Tbk	100%		100%		100%	
Bank Bumi Arta Tbk	100%		100%		100%	
Bumiputera Indonesia Tbk	100%		100%		100%	
Bank Central Asia Tbk	100%		100%		100%	
Bank Mutiara Tbk	100%		100%		100%	
Bank Danamon Tbk	100%		100%		100%	
Bank Eksekutif Internasional Tbk	100%		100%		100%	
Bank Mandiri (Persero) Tbk	80%	20%	75%	25%	75%	25%
Bank Mega Tbk	100%		100%		100%	
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	100%		100%		100%	
Bank CIMB Niaga Tbk	100%		100%		100%	
Bank Permata Tbk	66,67%	33,33%	100%		100%	
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	80%	20%	80%	20%	80%	20%
Bank Victoria International Tbk	33,33%	66,67%	33,33%	66,67%	33,33%	66,67%
Bank Windu Kentjana International Tbk	100%		100%		100%	
Bank Ekonomi Raharja Tbk	100%		75%	25%	75%	25%
5 perusahaan/total	<u>1460%</u> 16	<u>140%</u> 16	<u>1463,33%</u> 16	<u>136,67%</u> 16	<u>1463,33%</u> 16	<u>136,67%</u> 16
rata-rata:	91,25%	8,75%	91,46%	8,54%	91,46%	8,54%

TINGKAT EDUKASI ANGGOTA KOMITE AUDIT -2007

	%	
	≤S1	S2≥
Bank Artha Graha Internasional Tbk	100%	
Bank Bumi Arta Tbk	100%	
Bumiputera Indonesia Tbk	100%	
Bank Central Asia Tbk		100%
Bank Mutiara Tbk	66,67%	33,33%
Bank Danamon Tbk	50%	50%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	60%	40%
Bank Mega Tbk	100%	
Bank OCBC NISP Tbk	50%	50%
Bank Nusantara Parahyangan Tbk	100%	
Bank Agroniaga Tbk	66,67%	33,33%
11 perusahaan/total	<u>793,34%</u> 11	<u>306,66%</u> 11
Rata-rata:	72,12%	27,88%

TINGKAT EDUKASI ANGGOTA KOMITE AUDIT-2008

	%	
	≤S1	S2≥
Bank Artha Graha Internasional Tbk	100%	
Bank Bukopin Tbk	33,33%	66,67%
Bank Bumi Arta Tbk	100%	
Bumiputera Indonesia Tbk	100%	
Bank Central Asia Tbk		100%
Bank Mutiara Tbk	100%	
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	50%	50%
Bank Kesawan Tbk	100%	
Bank Mandiri (Persero) Tbk	75%	25%
Bank Mega Tbk	100%	
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	28,57%	71,43%
Bank OCBC NISP Tbk	50%	50%
Bank Rakyat Indonesia Tbk	20%	80%
Bank Swadesi Tbk	75%	25%
Bank Ekonomi Raharja Tbk	75%	25%
15 perusahaan/total	<u>1006,9%</u> 15	<u>493,1%</u> 15
Rata-rata:	67,13%	32,87%

TINGKAT EDUKASI ANGGOTA KOMITE AUDIT-2009

	%	
	≤S1	S2≥
Bank Artha Graha Internasional Tbk	100%	
Bank Bukopin Tbk	33,33%	66,67%
Bank Bumi Arta Tbk	100%	
Bumiputera Indonesia Tbk	100%	
Bank Central Asia Tbk		100%
Bank Mutiara Tbk	100%	
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	66,67%	33,33%
Bank Kesawan Tbk	100%	
Bank Mandiri (Persero) Tbk	75%	25%
Bank Mega Tbk	100%	
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	20%	80%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	20%	80%
Bank Swadesi Tbk	75%	25%
Bank Agroniaga Tbk	100%	
Bank Windu Kentjana International Tbk	33,33%	66,67%
Bank Ekonomi Raharja Tbk	75%	25%
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	60%	40%
17 perusahaan/total	<u>1158,33%</u> 17	<u>541,67%</u> 17
Rata-rata:	68,14%	31,86%

TREND TINGKAT EDUKASI ANGGOTA KOMITE AUDIT 2007-2009

	2007		2008		2009	
	≤S1	S2≥	≤S1	S2≥	≤S1	S2≥
Bank Artha Graha Internasional Tbk	100%		100%		100%	
Bank Bumi Arta Tbk	100%		100%		100%	
Bumiputera Indonesia Tbk	100%		100%		100%	
Bank Central Asia Tbk		100%		100%		100%
Bank Mutiara Tbk	66,67%	33,33%	100%		100%	
Bank Mandiri (Persero) Tbk	60%	40%	75%	25%	75%	25%
Bank Mega Tbk	100%		100%		100%	
7 perusahaan/total	<u>526,67%</u> 7	<u>173,33%</u> 7	<u>575%</u> 7	<u>125%</u> 7	<u>575%</u> 7	<u>125%</u> 7
Rata-rata:	75,24%	24,76%	82,14%	17,86%	82,14%	17,86%

Tingkat Usia Anggota Komite Audit 2007

	≤40	≥40
Bank Artha Graha Internasional Tbk	33,33%	66,67%
Bank Bumi Arta Tbk		100%
Bumiputera Indonesia Tbk		100%
Bank Central Asia Tbk		100%
Bank Mutiara Tbk		100%
Bank Danamon Tbk		100%
Bank Mandiri (Persero) Tbk		100%
Bank Mega Tbk		100%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		100%
Bank CIMB Niaga Tbk		100%
Bank OCBC NISP Tbk		100%
Bank Permata Tbk		100%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		100%
Bank Agroniaga Tbk		100%
14 perusahaan/total	<u>33,33%</u> 14	<u>1366,67%</u> 14
	2,38%	97,62%

Tingkat Usia Anggota Komite Audit 2008

	≤40	≥40
Bank Artha Graha Internasional Tbk	33,33%	66,67%
Bank Bukopin Tbk		100%
Bank Bumi Arta Tbk		100%
Bumiputera Indonesia Tbk		100%
Bank Mutiara Tbk		100%
Bank Danamon Tbk		100%
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk		100%
Bank Internasional Indonesia Tbk		100%
Bank Kesawan Tbk		100%
Bank Mandiri (Persero) Tbk		100%
Bank Mega Tbk		100%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		100%
Bank CIMB Niaga Tbk		100%
Bank OCBC NISP Tbk		100%
Bank Permata Tbk		100%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		100%
Bank Swadesi Tbk		100%
Bank Ekonomi Raharja Tbk		100%
18 perusahaan/total	<u>33,33%</u> 18	<u>1766,67%</u> 18
	1,85%	98,15%

Tingkat Usia Anggota Komite Audit 2009

	≤40	≥40
Bank Artha Graha Internasional Tbk	50%	50%
Bank Bukopin Tbk		100%
Bank Bumi Arta Tbk		100%
Bumiputera Indonesia Tbk		100%
Bank Central Asia Tbk		100%
Bank Mutiara Tbk		100%
Bank Danamon Tbk		100%
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk		100%
Bank Internasional Indonesia Tbk		100%
Bank Kesawan Tbk		100%
Bank Mandiri (Persero) Tbk		100%
Bank Mega Tbk		100%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		100%
Bank CIMB Niaga Tbk		100%
Bank Permata Tbk		100%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		100%
Bank Swadesi Tbk		100%
Bank Agroniaga Tbk		100%
Bank Windu Kentjana International Tbk		100%
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk		100%
20 perusahaan/total	<u>50%</u> 20	<u>1950%</u> 20
	2,5%	97,5%

Latar Belakang Pendidikan Anggota Komite Audit 2007

	eko	non
Bank Artha Graha Internasional Tbk	66,67%	33,33%
Bank Bumi Arta Tbk	66,67%	33,33%
Bumiputera Indonesia Tbk	100%	
Bank Central Asia Tbk	100%	
Bank Mutiara Tbk	100%	
Bank Danamon Tbk	83,33%	16,67%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	100%	
Bank Mega Tbk	66,67%	—
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	80%	20%
Bank CIMB Niaga Tbk	75%	25%
Bank Permata Tbk	100%	
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	100%	
Bank Agroniaga Tbk	100%	
13 perusahaan/total	<u>1138,34%</u> 13	<u>128,33%</u> 13
	87,56%	9,87%

Latar Belakang Pendidikan Anggota Komite Audit 2008

	eko	non
Bank Artha Graha Internasional Tbk	66,67%	33,33%
Bank Bukopin Tbk	33,33%	66,67%
Bank Bumi Arta Tbk	33,33%	66,67%
Bumiputera Indonesia Tbk	100%	
Bank Mutiara Tbk	100%	
Bank Danamon Tbk	66,67%	33,33%
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	66,67%	33,33%
Bank Internasional Indonesia Tbk	100%	
Bank Kesawan Tbk	50%	50%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	100%	
Bank Mega Tbk	66,67%	—
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	100%	
Bank CIMB Niaga Tbk	85,14%	14,86%
Bank OCBC NISP Tbk	75%	25%
Bank Permata Tbk	100%	
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	100%	
Bank Swadesi Tbk	50%	50%
Bank Ekonomi Raharja Tbk	75%	25%
18 perusahaan/total	<u>1368,48%</u> 18	<u>398,19%</u> 18
	76,03%	22,12%

Latar Belakang Pendidikan Komite Audit 2009

	eko	non
Bank Artha Graha Internasional Tbk	75%	25%
Bank Bukopin Tbk	33,33%	66,67%
Bank Bumi Arta Tbk	66,67%	33,33%
Bumiputera Indonesia Tbk	100%	
Bank Central Asia Tbk	100%	
Bank Mutiara Tbk	66,67%	33,33%
Bank Danamon Tbk	66,67%	33,33%
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	66,67%	33,33%
Bank Internasional Indonesia Tbk	100%	
Bank Kesawan Tbk	100%	
Bank Mandiri (Persero) Tbk	100%	
Bank Mega Tbk	66,67%	—
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	100%	
Bank CIMB Niaga Tbk	85,14%	14,86%
Bank Permata Tbk	100%	
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	100%	
Bank Swadesi Tbk	50%	50%
Bank Agroniaga Tbk	100%	
Bank Windu Kentjana International Tbk	100%	
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	100%	
20 perusahaan/total	<u>1676,82%</u> 20	<u>289,85%</u> 20
	83,84%	14,49%

Analisis Kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5

Komite Audit 2007

Komite Audit 2008

Komite Audit 2009

	kesimpulan
Bank Artha Graha Internasional Tbk	Tidak
Bank Bumi Arta Tbk	Ya
Bumiputera Indonesia Tbk	Ya
Bank Central Asia Tbk	Ya
Bank Mutiara Tbk	Ya
Bank Danamon Tbk	Ya
Bank Eksekutif Internasional Tbk	Ya
Bank Kesawan Tbk	Tidak
Bank Mandiri (Persero) Tbk	Ya
Bank Mayapada Tbk	Ya
Bank Mega Tbk	Ya
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Ya
Bank CIMB Niaga Tbk	Ya
Bank OCBC NISP Tbk	Ya
Bank Nusantara Parahyangan Tbk	Ya
Bank Permata Tbk	Ya
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Ya
Bank Victoria International Tbk	Ya
Bank Agroniaga Tbk	Ya
Bank Windu Kentjana International Tbk	Tidak
Bank Ekonomi Raharja Tbk	Ya

	kesimpulan
Bank Artha Graha Internasional Tbk	Tidak
Bank Bukopin Tbk	Ya
Bank Bumi Arta Tbk	Ya
Bumiputera Indonesia Tbk	Ya
Bank Mutiara Tbk	Tidak
Bank Danamon Tbk	Ya
Bank Eksekutif Internasional Tbk	Ya
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	Ya
Bank Internasional Indonesia Tbk	Ya
Bank Kesawan Tbk	Tidak
Bank Mandiri (Persero) Tbk	Ya
Bank Mayapada Tbk	Ya
Bank Mega Tbk	Ya
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Ya
Bank CIMB Niaga Tbk	Ya
Bank OCBC NISP Tbk	Ya
Ya Bank Permata Tbk	Ya
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Ya
Bank Swadesi Tbk	Ya
Bank Victoria International Tbk	Ya
Bank Capital Indonesia Tbk	Ya
Bank Windu Kentjana International Tbk	Tidak
Bank Ekonomi Raharja Tbk	Ya

	kesimpulan
Bank Artha Graha Internasional Tbk	Ya
Bank Bukopin Tbk	Ya
Bank Bumi Arta Tbk	Tidak
Bumiputera Indonesia Tbk	Ya
Bank Central Asia Tbk	Ya
Bank Mutiara Tbk	Ya
Bank Danamon Tbk	Ya
Bank Eksekutif Internasional Tbk	Ya
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	Ya
Bank Internasional Indonesia Tbk	Ya
Bank Kesawan Tbk	Ya
Bank Mandiri (Persero) Tbk	Ya
Bank Mayapada Tbk	Ya
Bank Mega Tbk	Ya
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Ya
Bank CIMB Niaga Tbk	Ya
Bank Nusantara Parahyangan Tbk	Ya
Bank Permata Tbk	Ya
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Ya
Bank Swadesi Tbk	Ya
Bank Victoria International Tbk	Ya
Bank Agroniaga Tbk	Ya
Bank Capital Indonesia Tbk	Ya
Bank Windu Kentjana International Tbk	Ya
Bank Ekonomi Raharja Tbk	Ya
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	Ya

Trend Kepatuhan Perusahaan terhadap Peraturan Bapepam-LK No. IX.1.5

	2007	2008	2009
Bank Artha Graha Internasional Tbk	Tidak	Tidak	Ya
Bank Bumi Arta Tbk	Ya	Ya	Tidak
Bumiputera Indonesia Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Mutiara Tbk	Ya	Tidak	Ya
Bank Danamon Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Eksekutif Internasional Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Kesawan Tbk	Tidak	Tidak	Ya
Bank Mandiri (Persero) Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Mayapada Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Mega Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank CIMB Niaga Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Permata Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Victoria International Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Windu Kentjana International Tbk	Tidak	Tidak	Ya
Bank Ekonomi Raharja Tbk	Ya	Ya	Ya

ANALISIS PERSENTASE JUMLAH PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.8/14/PBI/2006

KOMITE AUDIT TAHUN 2007

KOMITE AUDIT TAHUN 2008

KOMITE AUDIT TAHUN 2009

Bank	Ya/Tidak
Bank Agroniaga Tbk	Ya
Bank Artha Graha Internasional Tbk	Tidak
Bank Bumi Artha Tbk	Ya
Bank Central Asia Tbk	Ya
Bank CIMB Niaga Tbk	Ya
Bank Danamon Indonesia Tbk	Ya
Bank Ekonomi Raharja Tbk	Ya
Bank Eksekutif Internasional Tbk	Ya
Bank ICB Bumiputera Tbk	Ya
Bank Kesawan Tbk	Tidak
Bank Mandiri (Persero) Tbk	Ya
Bank Mayapada Tbk	Ya
Bank Mega Tbk	Ya
Bank Mutiara Tbk	Ya
Bank Negara Indonesia Tbk	Ya
Bank Nusantara Parahyangan Tbk	Ya
Bank OCBC NISP Tbk	Ya
Bank Permata Tbk	Ya
BRI Tbk	Ya
Bank Victoria Int Tbk	Ya
Bank Windu Kentjana Int'l Tbk	Tidak

Analisis:
 Total perusahaan: 30 perusahaan
 Sampel yang tidak memenuhi syarat: 9 perusahaan
 Total sampel: 21 perusahaan

Jumlah perusahaan yang ber kriteria "Ya" sebanyak:
 $\frac{18}{21} \times 100\% = 85,71\%$

Bank	Ya/Tidak
Bank Artha Graha Internasional Tbk	Tidak
Bank Bukopin Tbk	Ya
Bank Bumi Artha Tbk	Ya
Bank Capital Indonesia Tbk	Ya
Bank Central Asia Tbk	Ya
Bank CIMB Niaga Tbk	Ya
Bank Danamon Indonesia Tbk	Ya
Bank Ekonomi Raharja Tbk	Ya
Bank Eksekutif Internasional Tbk	Ya
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	Ya
Bank ICB Bumiputera Tbk	Ya
Bank Internasional Indonesia Tbk	Ya
Bank Kesawan Tbk	Tidak
Bank Mandiri (Persero) Tbk	Ya
Bank Mayapada Tbk	Ya
Bank Mega Tbk	Ya
Bank Mutiara Tbk	Tidak
Bank Negara Indonesia Tbk	Ya
Bank OCBC NISP Tbk	Ya
Bank Permata Tbk	Ya
Bank Rakyat Indonesia Tbk	Ya
Bank Swadesi Tbk	Ya
Bank Victoria International Tbk	Ya
Bank Windu Kentjana Int'l Tbk	Tidak

Analisis:
 Total perusahaan: 28 perusahaan
 Sampel yang tidak memenuhi syarat: 4 perusahaan
 Total sampel: 24 perusahaan

Jumlah perusahaan yang ber kriteria "Ya" sebanyak:
 $\frac{20}{24} \times 100\% = 83,33\%$

Bank	Ya/Tidak
Bank Agroniaga Tbk	Ya
Bank Artha Graha Internasional Tbk	Ya
Bank Bukopin Tbk	Ya
Bank Bumi Artha Tbk	Tidak
Bank Capital Indonesia Tbk	Ya
Bank Central Asia Tbk	Ya
Bank CIMB Niaga Tbk	Ya
Bank Danamon Indonesia Tbk	Ya
Bank Ekonomi Raharja Tbk	Ya
Bank Eksekutif Internasional Tbk	Ya
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	Ya
Bank ICB Bumiputera Tbk	Ya
Bank Internasional Indonesia Tbk	Ya
Bank Kesawan Tbk	Ya
Bank Mandiri (Persero) Tbk	Ya
Bank Mayapada Tbk	Ya
Bank Mega Tbk	Tidak
Bank Mutiara Tbk	Ya
Bank Negara Indonesia Tbk	Ya
Bank Nusantara Parahyangan Tbk	Ya
Bank Permata Tbk	Ya
Bank Rakyat Indonesia Tbk	Ya
Bank Swadesi Tbk	Ya
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	Ya
Bank Victoria International Tbk	Ya
Bank Windu Kentjana Int'l Tbk	Tidak

Analisis:
 Total perusahaan: 29 perusahaan
 Sampel yang tidak memenuhi syarat: 3 perusahaan
 Total sampel: 26 perusahaan

Jumlah perusahaan yang ber kriteria "Ya" sebanyak:
 $\frac{23}{26} \times 100\% = 88,46\%$

TREND KEPATUHAN PERUSAHAAN TERHADAP PERATURAN BANK INDONESIA
NO.8/14/PBI/2006 PADA KOMITE AUDIT

	2007	2008	2009
Bank Artha Graha Internasional Tbk	Tidak	Tidak	Ya
Bank Bumi Artha Tbk	Ya	Ya	Tidak
Bank Central Asia Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank CIMB Niaga Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Danamon Indonesia Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Ekonomi Raharja Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Eksekutif Internasional Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank ICB Bumiputera Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Kesawan Tbk	Tidak	Tidak	Ya
Bank Mandiri (Persero) Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Mayapada Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Mega Tbk	Ya	Ya	Tidak
Bank Mutiara Tbk	Ya	Tidak	Ya
Bank Negara Indonesia Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Permata Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Rakyat Indonesia Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Victoria International Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Windu Kentjana Int'l Tbk	Tidak	Tidak	Tidak

Analisis(2007):

Total perusahaan: 30 perusahaan
Sampel yang tidak memenuhi syarat: 12 perusahaan
Total sampel: 18 perusahaan

Jumlah perusahaan yang berkriteria "Ya" sebanyak:
 $\frac{15}{18} \times 100\% = 83,33\%$

Analisis (2008):

Total perusahaan: 28 perusahaan
Sampel yang tidak memenuhi syarat: 10 perusahaan
Total sampel: 18 perusahaan

Jumlah perusahaan yang berkriteria "Ya" sebanyak:
 $\frac{14}{18} \times 100\% = 77,77\%$

Analisis (2009):

Total perusahaan: 29 perusahaan
Sampel yang tidak memenuhi syarat: 11 perusahaan
Total sampel: 18 perusahaan

Jumlah perusahaan yang berkriteria "Ya" sebanyak:
 $\frac{15}{18} \times 100\% = 83,33\%$

KEBERADAAN KOMITE PEMANTAU RISIKO

	2007
Bank Artha Graha Internasional Tbk	1
Bank Bumi Arta Tbk	1
Bumiputera Indonesia Tbk	0
Bank Central Asia Tbk	1
Bank Mutiara Tbk	1
Bank Danamon Tbk	1
Bank Eksekutif Internasional Tbk	1
Bank Kesawan Tbk	0
Bank Mandiri (Persero) Tbk	1
Bank Mayapada Tbk	1
Bank Mega Tbk	1
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1
Bank CIMB Niaga Tbk	1
Bank OCBC NISP Tbk	1
Bank Nusantara Parahyangan Tbk	0
Bank Pan Indonesia Tbk	1
Bank Permata Tbk	1
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1
Bank Victoria International Tbk	1
Bank Agroniaga Tbk	1
Bank Windu Kentjana International Tbk	1
Bank Ekonomi Raharja Tbk	1

	2008
Bank Artha Graha Internasional Tbk	1
Bank Bukopin Tbk	1
Bank Bumi Arta Tbk	1
Bumiputera Indonesia Tbk	1
Bank Mutiara Tbk	1
Bank Danamon Tbk	1
Bank Eksekutif Internasional Tbk	1
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	1
Bank Internasional Indonesia Tbk	1
Bank Kesawan Tbk	1
Bank Mandiri (Persero) Tbk	1
Bank Mayapada Tbk	1
Bank Mega Tbk	1
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1
Bank CIMB Niaga Tbk	1
Bank, OCBC NISP Tbk	1
Bank Pan Indonesia Tbk	1
Bank Permata Tbk	1
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1
Bank Swadesi Tbk	1
Bank Victoria International Tbk	1
Bank Capital Indonesia Tbk	1
Bank Windu Kentjana International Tbk	1
Bank Ekonomi Raharja Tbk	1

	2009
Bank Artha Graha Internasional Tbk	1
Bank Bukopin Tbk	1
Bank Bumi Arta Tbk	1
Bumiputera Indonesia Tbk	1
Bank Central Asia Tbk	1
Bank Mutiara Tbk	1
Bank Danamon Tbk	1
Bank Eksekutif Internasional Tbk	1
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	1
Bank Internasional Indonesia Tbk	1
Bank Kesawan Tbk	1
Bank Mandiri (Persero) Tbk	1
Bank Mayapada Tbk	1
Bank Mega Tbk	1
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1
Bank CIMB Niaga Tbk	1
Bank Nusantara Parahyangan Tbk	1
Bank Pan Indonesia Tbk	1
Bank Permata Tbk	1
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1
Bank Swadesi Tbk	1
Bank Victoria International Tbk	1
Bank Agroniaga Tbk	1
Bank Capital Indonesia Tbk	1
Bank Windu Kentjana International Tbk	1
Bank Ekonomi Raharja Tbk	1
Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	1

GENDER ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO-2007

	%	
	Pria	Wanita
Bank Artha Graha Internasional Tbk	100%	
Bank Bumi Arta Tbk	100%	
Bumiputera Indonesia Tbk	100%	
Bank Central Asia Tbk	33,33%	66,67%
Bank Mutiara Tbk	100%	
Bank Danamon Tbk	100%	
Bank Eksekutif Int Tbk	100%	
Bank Mandiri (Persero) Tbk	75%	25%
Bank Mega Tbk	100%	
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	60%	40%
Bank CIMB Niaga Tbk	75%	25%
Bank OCBC NISP Tbk	80%	20%
Bank Permata Tbk	100%	
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	100%	
Bank Victoria International Tbk	66,67%	33,33%
Bank Agroniaga Tbk	100%	
Bank Windu Kentjana International Tbk	100%	
Bank Ekonomi Raharja Tbk	100%	
18 perusahaan/total	1590% 18	210% 18
Rata-rata:	88,33%	11,67%

GENDER ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO-2008

	%	
	Pria	Wanita
Bank Artha Graha Internasional Tbk	100%	
Bank Bukopin Tbk	100%	
Bank Bumi Arta Tbk	100%	
Bumiputera Indonesia Tbk	100%	
Bank Mutiara Tbk	100%	
Bank Danamon Tbk	100%	
Bank Eksekutif Internasional Tbk	100%	
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	66,67%	33,33%
Bank Internasional Indonesia Tbk	100%	
Bank Kesawan Tbk	100%	
Bank Mandiri (Persero) Tbk	75%	25%
Bank Mega Tbk	100%	
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	80%	20%
Bank CIMB Niaga Tbk	60%	40%
Bank OCBC NISP Tbk	80%	20%
Bank Permata Tbk	100%	
Bank Swadesi Tbk	100%	
Bank Victoria International Tbk	66,67%	33,33%
Bank Capital Indonesia Tbk	66,67%	33,33%
Bank Windu Kentjana International Tbk	100%	
Bank Ekonomi Raharja Tbk	100%	
21 perusahaan/total	<u>1895,01%</u> 21	<u>204,99%</u> 21
Rata-rata:	90,24%	9,76%

GENDER ANGGOTA PEMANTAU RISIKO-2009

	%	
	Pria	Wanita
Bank Artha Graha Internasional Tbk	100%	
Bank Bukopin Tbk	100%	
Bank Bumi Arta Tbk	100%	
Bumiputera Indonesia Tbk	75%	25%
Bank Central Asia Tbk	66,67%	33,33%
Bank Mutiara Tbk	100%	
Bank Danamon Tbk	100%	
Bank Eksekutif Internasional Tbk	100%	
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	100%	
Bank Internasional Indonesia Tbk	100%	
Bank Kesawan Tbk	100%	
Bank Mandiri (Persero) Tbk	75%	25%
Bank Mega Tbk	100%	
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	75%	25%
Bank CIMB Niaga Tbk	60%	40%
Bank Nusantara Parahyangan Tbk	100%	
Bank Permata Tbk	100%	
Bank Swadesi Tbk	100%	
Bank Victoria International Tbk	66,67%	33,33%
Bank Agroniaga Tbk	100%	
Bank Capital Indonesia Tbk	100%	
Bank Windu Kentjana International Tbk	100%	
Bank Ekonomi Raharja Tbk	100%	
23 perusahaan/total	<u>2118,34%</u> 23	<u>181,66%</u> 23
Rata-rata:	92,10%	7,90%

TREND GENDER ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO

	2007		2008		2009	
	Pria(%)	Wanita(%)	Pria(%)	Wanita(%)	Pria(%)	Wanita(%)
Bank Artha Graha Internasional Tbk	100%		100%		100%	
Bank Bumi Arta Tbk	100%		100%		100%	
Bumiputera Indonesia Tbk	100%		100%		75%	25%
Bank Mutiara Tbk	100%		100%		100%	
Bank Danamon Tbk	100%		100%		100%	
Bank Eksekutif Internasional Tbk	100%		100%		100%	
Bank Mandiri (Persero) Tbk	75%	25%	75%	25%	75%	25%
Bank Mega Tbk	100%		100%		100%	
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	60%	40%	80%	20%	80%	20%
Bank CIMB Niaga Tbk	75%	25%	60%	40%	60%	40%
Bank Permata Tbk	100%		100%		100%	
Bank Victoria International Tbk	66,67%	33,33%	66,67%	33,33%	66,67%	33,33%
Bank Windu Kentjana International Tbk	100%		100%		100%	
Bank Ekonomi Raharja Tbk	100%		100%		100%	
14 perusahaan/total	1276,67%	123,33%	1281,67%	118,33%	1256,67%	143,33%
	14	14	14	14	14	14
Rata-rata:	91,19%	8,81%	91,55%	8,45%	89,76%	10,24%

TINGKAT EDUKASI ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO-2007

	%	
	≤S1	S2≥
Bank Artha Graha Internasional Tbk	100%	
Bank Bumi Arta Tbk	100%	
Bumiputera Indonesia Tbk	66,67%	33,33%
Bank Central Asia Tbk	33,33%	66,67%
Bank Mutiara Tbk	100%	
Bank Danamon Tbk	50%	50%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	75%	25%
Bank Mega Tbk	33,33%	66,67%
Bank OCBC NISP Tbk	80%	20%
9 perusahaan	<u>638,33%</u> 9	<u>261,67%</u> 9
Rata-rata;	70,93%	29,07%

TINGKAT EDUKASI ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO-2008

	%	
	≤S1	S2≥
Bank Artha Graha Internasional Tbk	100%	
Bank Bukopin Tbk		100%
Bank Bumi Arta Tbk	100%	
Bumiputera Indonesia Tbk	66,67%	33,33%
Bank Mutiara Tbk	100%	
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	33,33%	66,67%
Bank Kesawan Tbk	50%	50%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	75%	25%
Bank Mega Tbk	33,33%	66,67%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	60%	40%
Bank OCBC NISP Tbk	80%	20%
Bank Swadesi Tbk	100%	
12 perusahaan	<u>798,33%</u> 12	<u>401,67%</u> 12
Rata-rata:	66,53%	33,47%

TINGKAT EDUKASI ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO-2009

	%	
	≤S1	S2≥
Bank Artha Graha Internasional Tbk	100%	
Bank Bukopin Tbk		100%
Bank Bumi Arta Tbk	100%	
Bumiputera Indonesia Tbk	75%	25%
Bank Central Asia Tbk		100%
Bank Mutiara Tbk	66,67%	33,33%
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	50%	50%
Bank Kesawan Tbk	100%	
Bank Mandiri (Persero) Tbk	75%	25%
Bank Mega Tbk	33,33%	66,67%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	60%	40%
Bank Swadesi Tbk	100%	
Bank Agroniaga Tbk		100%
Bank Windu Kentjana International Tbk	33,33%	66,67%
14 perusahaan	<u>793,33%</u> 14	<u>606,67%</u> 14
Rata-rata:	56,67%	43,33%

Tingkat Usia Anggota Komite Pemantau Risiko 2007

	≤40	≥40
Bank Artha Graha Internasional Tbk	33,33%	66,67%
Bank Bumi Arta Tbk		100%
Bumiputera Indonesia Tbk		100%
Bank Central Asia Tbk		100%
Bank Mutiara Tbk		100%
Bank Danamon Tbk		100%
Bank Mandiri (Persero) Tbk		100%
Bank Mega Tbk		100%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		100%
Bank CIMB Niaga Tbk		100%
10 perusahaan/total	<u>33,33%</u> 10	<u>966,67%</u> 10
	3,33%	96,67%

Tingkat Usia Anggota Komite Pemantau Risiko 2008

	≤40	≥40
Bank Artha Graha Internasional Tbk	33,33%	66,67%
Bank Bukopin Tbk		100%
Bank Bumi Arta Tbk		100%
Bumiputera Indonesia Tbk		100%
Bank Mutiara Tbk		100%
Bank Danamon Tbk		100%
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk		100%
Bank Internasional Indonesia Tbk		100%
Bank Kesawan Tbk		100%
Bank Mandiri (Persero) Tbk		100%
Bank Mega Tbk		100%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		100%
Bank CIMB Niaga Tbk		100%
Bank Permata Tbk		100%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	20%	80%
15 perusahaan/total	<u>53,33%</u> 15	<u>1446,67%</u> 15
	3,56%	96,44%

Tingkat Usia Anggota Komite Pemantau Risiko 2009

	≤40	≥40
Bank Artha Graha Internasional Tbk	50%	50%
Bank Bukopin Tbk		100%
Bank Bumi Arta Tbk		100%
Bumiputera Indonesia Tbk		100%
Bank Central Asia Tbk		100%
Bank Mutiara Tbk		100%
Bank Danamon Tbk		100%
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk		100%
Bank Kesawan Tbk		100%
Bank Mandiri (Persero) Tbk		100%
Bank Mega Tbk		100%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		100%
Bank CIMB Niaga Tbk		100%
Bank Permata Tbk		100%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	33,33%	66,67%
Bank Agroniaga Tbk		100%
Bank Windu Kentjana International Tbk		100%
17 perusahaan/total	<u>83,33%</u> 17	<u>1616,67%</u> 17
	4,90%	95,1%

Latar Belakang Pendidikan Anggota Komite Pemantau Risiko 2007

	Ekonomi	Non
Bank Artha Graha Internasional Tbk	66,67%	33,33%
Bank Bumi Arta Tbk	66,67%	33,33%
Bumiputera Indonesia Tbk	100%	
Bank Central Asia Tbk	100%	
Bank Mutiara Tbk	100%	
Bank Danamon Tbk	83,33%	16,67%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	100%	
Bank Mega Tbk	100%	
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	80%	20%
Bank CIMB Niaga Tbk	100%	
10 perusahaan/total	<u>896,67%</u> 10	<u>103,33%</u> 10
	89,67%	10,33%

Latar Belakang Pendidikan Anggota Komite Pemantau Risiko 2008

	Ekonomi	Non
Bank Artha Graha Internasional Tbk	66,67%	33,33%
Bank Bukopin Tbk	100%	
Bank Bumi Arta Tbk	66,67%	33,33%
Bumiputera Indonesia Tbk	100%	
Bank Mutiara Tbk	100%	
Bank Danamon Tbk	66,67%	33,33%
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	100%	
Bank Internasional Indonesia Tbk	100%	
Bank Kesawan Tbk	50%	50%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	100%	
Bank Mega Tbk	100%	
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	80%	20%
Bank CIMB Niaga Tbk	60%	20%
Bank Permata Tbk	100%	
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	60%	40%
15 perusahaan/total	<u>1250,01%</u> 15	<u>229,99%</u> 15
	83,34%	15,33%

Latar Belakang Pendidikan Anggota Komite Pemantau Risiko 2009

	Ekonomi	Non
Bank Artha Graha Internasional Tbk	100%	
Bank Bukopin Tbk	100%	
Bank Bumi Arta Tbk	66,67%	33,33%
Bumiputera Indonesia Tbk	100%	
Bank Central Asia Tbk	100%	
Bank Mutiara Tbk	66,67%	33,33%
Bank Danamon Tbk	75%	25%
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	100%	
Bank Kesawan Tbk	100%	
Bank Mandiri (Persero) Tbk	100%	
Bank Mega Tbk	100%	
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	80%	20%
Bank CIMB Niaga Tbk	60%	20%
Bank Permata Tbk	100%	
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	83,33%	16,67%
Bank Agroniaga Tbk	100%	
Bank Windu Kentjana International Tbk	100%	
17 perusahaan/total	<u>1531,67%</u> 17	<u>148,33%</u> 17
	90,1%	8,73%

ANALISIS PERSENTASE JUMLAH PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN PERATURAN BANK INDONESIA NO.8/14/PBI/2006

KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2007

KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2008

KOMITE PEMANTAU RISIKO TAHUN 2009

Bank	Ya/Tidak
Bank Artha Graha Internasional Tbk	Tidak
Bank Bumi Artha Tbk	Ya
Bank Central Asia Tbk	Ya
Bank CIMB Niaga Tbk	Ya
Bank Danamon Indonesia Tbk	Ya
Bank Eksekutif Internasional Tbk	Tidak
Bank ICB Bumiputera Tbk	Tidak
Bank Kesawan Tbk	Tidak
Bank Mandiri (Persero) Tbk	Tidak
Bank Mayapada Tbk	Ya
Bank Mega Tbk	Ya
Bank Mutiara Tbk	Tidak
Bank Negara Indonesia Tbk	Ya
Bank Nusantara Parahyangan Tbk	Tidak
Bank OCBC NISP Tbk	Ya
Bank Permata Tbk	Ya
Bank Rakyat Indonesia Tbk	Ya
Bank Victoria Int Tbk	Ya

Analisis:
 Total perusahaan: 30 perusahaan
 Sampel yang tidak memenuhi syarat: 12 perusahaan
 Total sampel: 18 perusahaan

Jumlah perusahaan yang berkriteria "Ya" sebanyak:
 $\frac{11}{21} \times 100\% = 55\%$

Bank	Ya/Tidak
Bank Artha Graha Internasional Tbk	Tidak
Bank Bukopin Tbk	Tidak
Bank Bumi Artha Tbk	Ya
Bank Capital Indonesia Tbk	Tidak
Bank CIMB Niaga Tbk	Ya
Bank Danamon Indonesia Tbk	Ya
Bank Ekonomi Raharja Tbk	Ya
Bank Eksekutif Internasional Tbk	Tidak
Bank ICB Bumiputera Tbk	Tidak
Bank Internasional Indonesia Tbk	
Bank Kesawan Tbk	Tidak
Bank Mandiri (Persero) Tbk	Tidak
Bank Mega Tbk	Ya
Bank Mutiara Tbk	Tidak
Bank Negara Indonesia Tbk	Ya
Bank OCBC NISP Tbk	Ya
Bank Permata Tbk	Ya
Bank Rakyat Indonesia Tbk	Ya
Bank Swadesi Tbk	Ya
Bank Victoria Int Tbk	Ya

Analisis:
 Total perusahaan: 28 perusahaan
 Sampel yang tidak memenuhi syarat: 8 perusahaan
 Total sampel: 20 perusahaan

Jumlah perusahaan yang berkriteria "Ya" sebanyak:
 $\frac{12}{20} \times 100\% = 60\%$

Bank	Ya/Tidak
Bank Agroniaga Tbk	Ya
Bank Artha Graha Internasional Tbk	Ya
Bank Bukopin Tbk	Tidak
Bank Bumi Artha Tbk	Ya
Bank Capital Indonesia Tbk	Ya
Bank Central Asia Tbk	Ya
Bank CIMB Niaga Tbk	Ya
Bank Danamon Indonesia Tbk	Ya
Bank Ekonomi Raharja Tbk	Ya
Bank Eksekutif Internasional Tbk	Tidak
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	Tidak
Bank ICB Bumiputera Tbk	Ya
Bank Internasional Indonesia Tbk	Ya
Bank Kesawan Tbk	Ya
Bank Mandiri (Persero) Tbk	Tidak
Bank Mayapada Tbk	Ya
Bank Mega Tbk	Ya
Bank Mutiara Tbk	Tidak
Bank Negara Indonesia Tbk	Ya
Bank Permata Tbk	Ya
Bank Rakyat Indonesia Tbk	Ya
Bank Swadesi Tbk	Ya
Bank Victoria Int Tbk	Ya

Analisis:
 Total perusahaan: 30 perusahaan
 Sampel yang tidak memenuhi syarat: 7 perusahaan
 Total sampel: 23 perusahaan

Jumlah perusahaan yang berkriteria "Ya" sebanyak:
 $\frac{17}{23} \times 100\% = 73,91\%$

TREND KEPATUHAN PERUSAHAAN TERHADAP PERATURAN BANK INDONESIA
NO.8/14/PBI/2006 PADA KOMITE PEMANTAU RISIKO

	2007	2008	2009
Bank Artha Graha Internasional Tbk	Tidak	Tidak	Ya
Bank Bumi Artha Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank CIMB Niaga Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Danamon Indonesia Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Eksekutif Internasional Tbk	Tidak	Tidak	Tidak
Bank ICB Bumiputera Tbk	Tidak	Tidak	Ya
Bank Kesawan Tbk	Tidak	Tidak	Ya
Bank Mandiri (Persero) Tbk	Tidak	Tidak	Tidak
Bank Mega Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Mutiara Tbk	Tidak	Tidak	Tidak
Bank Negara Indonesia Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Permata Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Rakyat Indonesia Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Victoria International Tbk	Ya	Ya	Ya

Analisis(2007):

Total perusahaan: 30 perusahaan
Sampel yang tidak memenuhi syarat: 16 perusahaan
Total sampel: 14 perusahaan

Jumlah perusahaan yang berkriteria "Ya" sebanyak:

$$\frac{8}{14} \times 100\% = 57,14\%$$

Analisis (2008):

Total perusahaan: 28 perusahaan
Sampel yang tidak memenuhi syarat: 14 perusahaan
Total sampel: 14 perusahaan

Jumlah perusahaan yang berkriteria "Ya" sebanyak:

$$\frac{8}{14} \times 100\% = 57,14\%$$

Analisis (2009):

Total perusahaan: 29 perusahaan
Sampel yang tidak memenuhi syarat: 15 perusahaan
Total sampel: 14 perusahaan

Jumlah perusahaan yang berkriteria "Ya" sebanyak:

$$\frac{11}{14} \times 100\% = 78,57\%$$

TREND GENDER ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI 2007-2009

	2007		2008		2009	
	Pria(%)	Wanita(%)	Pria(%)	Wanita(%)	Pria(%)	Wanita(%)
Bank Artha Graha Internasional Tbk	66,67%	33,33%	66,67%	33,33%	75%	25%
Bank Bumi Arta Tbk	66,67%	33,33%	75%	25%	75%	25%
Bumiputera Indonesia Tbk	66,67%	33,33%	66,67%	33,33%	66,67%	33,33%
Bank Mutiara Tbk	66,67%	33,33%	100%		100%	
Bank Danamon Tbk	80%	20%	80%	20%	80%	20%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	87,5%	12,5%	80%	20%	80%	20%
Bank Mega Tbk	100%		100%		100%	
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	83,33%	16,67%	83,33%	16,67%	83,33%	16,67%
Bank CIMB Niaga Tbk	80%	20%	33,33%	66,67%	80%	20%
Bank Permata Tbk	100%		100%		100%	
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	83,33%	16,67%	80%	20%	83,33%	16,67%
Bank Windu Kentjana International Tbk	100%		100%		100%	
Bank Ekonomi Raharja Tbk	66,67%	33,33%	33,33%	66,67%	66,67%	33,33%
13 perusahaan/total	<u>1047,51%</u> 13	<u>252,49%</u> 13	<u>998,33%</u> 13	<u>301,67%</u> 13	<u>1090%</u> 13	<u>210%</u> 13
Rata-rata:	80,58%	19,42%	76,79%	23,21%	83,85%	16,15%

Tingkat Edukasi Anggota Komite Nominasi & Remunerasi-2007

	%	
	≤S1	S2≥
Bank Artha Graha Internasional Tbk	100%	
Bank Bumi Arta Tbk	100%	
Bumiputera Indonesia Tbk		100%
Bank Central Asia Tbk	33,33%	66,67%
Bank Mutiara Tbk	100%	
Bank Eksekutif Internasional Tbk	66,67%	33,33%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	37,5%	62,50%
Bank Mega Tbk	66,67%	33,33%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	16,67%	83,33%
Bank OCBC NISP Tbk	75%	25%
10 perusahaan	<u>595,84%</u> 10	<u>404,16%</u> 10
	59,58%	40,42%

Tingkat Edukasi Anggota Komite Nominasi & Remunerasi-2008

	%	
	≤S1	S2≥
Bank Artha Graha Internasional Tbk	100%	
Bank Bukopin Tbk	80%	20%
Bank Bumi Arta Tbk	75%	25%
Bumiputera Indonesia Tbk	33,33%	66,67%
Bank Eksekutif Internasional Tbk	66,67%	33,33%
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	25%	75%
Bank Kesawan Tbk	50%	50%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	60%	40%
Bank Mega Tbk	66,67%	33,33%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		100%
Bank OCBC NISP Tbk	75%	25%
Bank Swadesi Tbk	75%	25%
12 perusahaan	<u>706,67%</u> * 12	<u>493,33%</u> 12
	58,90%	41,11%

Tingkat Edukasi Anggota Komite Nominasi & Remunerasi-2009

	%	
	≤S1	S2≥
Bank Artha Graha Internasional Tbk	100%	
Bank Bukopin Tbk	100%	
Bank Bumi Arta Tbk	75%	25%
Bumiputera Indonesia Tbk	33,33%	66,67%
Bank Central Asia Tbk	33,33%	66,67%
Bank Mutiara Tbk	66,67%	33,33%
Bank Eksekutif Internasional Tbk	66,67%	33,33%
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	33,33%	66,67%
Bank Kesawan Tbk	33,33%	66,67%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	50%	50%
Bank Mega Tbk	66,67%	33,33%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	16,67%	83,33%
Bank Swadesi Tbk	80%	20%
Bank Agroniaga Tbk	50%	50%
Bank Windu Kentjana International Tbk	66,67%	33,33%
15 perusahaan	<u>871,67%</u> 15	<u>628,33%</u> 15
	58,11%	41,89%

Tingkat Usia Anggota Komite Nominasi & Remunerasi 2007

	≤40	≥40
Bank Artha Graha Internasional Tbk		100%
Bank Bumi Arta Tbk	33,33%	66,67%
Bumiputera Indonesia Tbk	33,33%	66,67%
Bank Central Asia Tbk	33,33%	66,67%
Bank Danamon Tbk		100%
Bank Mandiri (Persero) Tbk		100%
Bank Mega Tbk		100%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		100%
Bank CIMB Niaga Tbk		100%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	16,67%	83,33%
10 perusahaan/total	<u>116,67%</u> 10	<u>883,34%</u> 10
	11,67%	88,33%

Tingkat Usia Anggota Komite Nominasi & Remunerasi 2008

	≤40	≥40
Bank Artha Graha Internasional Tbk		100%
Bank Bukopin Tbk		100%
Bank Bumi Arta Tbk	33,33%	66,67%
Bumiputera Indonesia Tbk	33,33%	66,67%
Bank Danamon Tbk		100%
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk		100%
Bank Kesawan Tbk		100%
Bank Mandiri (Persero) Tbk		100%
Bank Mega Tbk		100%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		100%
Bank CIMB Niaga Tbk		100%
Bank Permata Tbk		100%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk		100%
13 perusahaan/total	<u>66,66%</u> 13	<u>1233,34%</u> 13
	5,13%	94,87%

Tingkat Usia Anggota Komite Nominasi & Remunerasi 2009

	≤40	≥40
Bank Artha Graha Internasional Tbk		100%
Bank Bukopin Tbk		100%
Bank Bumi Arta Tbk	50%	50%
Bumiputera Indonesia Tbk	33,33%	66,67%
Bank Central Asia Tbk	33,33%	66,67%
Bank Danamon Tbk		100%
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk		100%
Bank Kesawan Tbk		100%
Bank Mandiri (Persero) Tbk		100%
Bank Mega Tbk		100%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk		100%
Bank CIMB Niaga Tbk		100%
Bank Permata Tbk		100%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	33,33%	66,67%
Bank Agroniaga Tbk		100%
Bank Windu Kentjana International Tbk		100%
16 perusahaan/total	<u>149,99%</u> 16	<u>1450,01%</u> 16
	9,37%	90,63%

Ltr Belakang Pend. Anggota Komite Nominasi & Remunerasi 2007

	Ekonomi	non
Bank Artha Graha Internasional Tbk	66,67%	33,33%
Bank Bumi Arta Tbk	66,67%	33,33%
Bumiputera Indonesia Tbk	100%	
Bank Central Asia Tbk	100%	
Bank Danamon Tbk	100%	
Bank Mandiri (Persero) Tbk	85,71%	14,29%
Bank Mega Tbk	66,67%	33,33%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	83,33%	16,67%
Bank CIMB Niaga Tbk	60%	20%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	66,67%	33,33%
10 perusahaan/total	<u>795,72%</u> 10	<u>184,28%</u> 10
	79,57%	18,42%

Ltr Belakang Pend Anggota Komite Nominasi & Remunerasi 2008

	Ekonomi	non
Bank Artha Graha Internasional Tbk	33,33%	66,67%
Bank Bukopin Tbk	20%	80%
Bank Bumi Arta Tbk	33,33%	66,67%
Bumiputera Indonesia Tbk	66,67%	33,33%
Bank Danamon Tbk	100%	
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	66,67%	33,33%
Bank Kesawan Tbk	50%	50%
Bank Mandiri (Persero) Tbk	80%	20%
Bank Mega Tbk	66,67%	33,33%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	83,33%	16,67%
Bank CIMB Niaga Tbk	60%	20%
Bank Permata Tbk	80%	20%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	60%	40%
13 perusahaan/total	800% 13	480% 13
	61,54%	36,92%

Ltr Belakang Pend Anggota Komite Nominasi & Remunerasi 2009

	Ekonomi	non
Bank Artha Graha Internasional Tbk	75%	25%
Bank Bukopin Tbk		100%
Bank Bumi Arta Tbk	50%	50%
Bumiputera Indonesia Tbk	66,67%	33,33%
Bank Central Asia Tbk	100%	
Bank Danamon Tbk	100%	
Bank Himpunan Saudara 1906 Tbk	50%	50%
Bank Kesawan Tbk	100%	
Bank Mandiri (Persero) Tbk	80%	20%
Bank Mega Tbk	66,67%	33,33%
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	83,33%	16,67%
Bank CIMB Niaga Tbk	60%	20%
Bank Permata Tbk	80%	20%
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	83,33%	16,67%
Bank Agroniaga Tbk	100%	
Bank Windu Kentjana International Tbk	66,67%	33,33%
16 perusahaan/total	<u>1161,67%</u> 16	<u>418,33%</u> 16
	72,60%	26,15%

TREND KEPATUHAN PERUSAHAAN TERHADAP PERATURAN BANK INDONESIA
NO.8/14/PBI/2006 PADA KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI

	2007	2008	2009
Bank Artha Graha Internasional Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Bumi Artha Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank CIMB Niaga Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Danamon Indonesia Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Ekonomi Raharja Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Eksekutif Internasional Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank ICB Bumiputera Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Kesawan Tbk	Tidak	Tidak	Ya
Bank Mandiri (Persero) Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Mega Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Mutiara Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Negara Indonesia Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Pan Indonesia Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Permata Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Rakyat Indonesia Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Victoria International Tbk	Ya	Ya	Ya
Bank Windu Kentjana Int'l Tbk	Ya	Ya	Ya

Analisis(2007):

Total perusahaan: 30 perusahaan
Sampel yang tidak memenuhi syarat: 13 perusahaan
Total sampel: 17 perusahaan

Jumlah perusahaan yang berkriteria "Ya" sebanyak:
 $\frac{15}{17} \times 100\% = 94,12\%$

Analisis(2008):

Total perusahaan: 28 perusahaan
Sampel yang tidak memenuhi syarat: 11 perusahaan
Total sampel: 17 perusahaan

Jumlah perusahaan yang berkriteria "Ya" sebanyak:
 $\frac{15}{17} \times 100\% = 94,12\%$

Analisis(2009):

Total perusahaan: 29 perusahaan
Sampel yang tidak memenuhi syarat: 12 perusahaan
Total sampel: 17 perusahaan

Jumlah perusahaan yang berkriteria "Ya" sebanyak:
 $\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$